

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017

Survei Antara Pelaku Usaha
di 12 Kota di Indonesia



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TII berterima kasih kepada **Ahsan Yunus, Andreas Pandiangan, Asrinaldi, Ben Satriatna, Doli Dalimunthe, Encep Endan, Hereyanto, Magdalena Wullur, Rusliansyah, Sigit Nugroho, Tini Anggraeni, dan Wisnu Wibowo** atas perannya sebagai koordinator tim peneliti lokal; serta **Bernadetta Widyastuti** atas perannya sebagai analis data dan **Alvin Nicola** atas perannya sebagai asisten peneliti.

Danish International Development Agency (DANIDA) telah memberikan dukungan berharga untuk terbitnya dokumen ini.

Penulis	Wawan Suyatmiko, Sekar Ratnaningtyas
Desain Layout	Bagus Belo Prayogo

Penerbit
Transparency International Indonesia
Jl. Amil Raya No.5, RT.01 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta 12510

Telepon	021-2279 2806, 021-2279 2807
Email	info@ti.or.id
Website	http://ti.or.id/

© 2017 Transparency International Indonesia

ISBN No. 978-602-72032-5-9

Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersaji dalam dokumen ini. Setiap informasi adalah benar per November 2017. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi-informasi ini untuk kepentingan lain atau dalam konteks lain.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA | INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



 **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption

Pengantar

Dalam skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis Transparency International menunjukkan Indonesia mengalami tren positif. Meski perlahan, peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun menunjukkan perlunya sebuah upaya yang lebih kuat lagi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peningkatan skor CPI yang melambat dikarenakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi saja. Reformasi birokrasi memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan skor CPI rata-rata 1 poin setiap tahun. Namun strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di aras nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan *National Integrity System* (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi dinilai berhasil jika terjadi peningkatan skor pada *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Kedua indikator tersebut mengukur indikator-indikator yang bersifat nasional. Dalam konteks desentralisasi/otonomi dan Stranas PPK, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang bisa berbeda dengan nasional. Untuk itu, perlu menyediakan alat tera dampak implementasi aksi Stranas PPK untuk konteks daerah.

Transparency International Indonesia (TI-I) sejak tahun 2004 telah melakukan penelitian dan merilis hasilnya sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survei Persepsi Korupsi dilakukan dalam frekuensi dwi-tahunan. Pada tahun 2017 ini survei dilakukan di 12 (dua belas) kota di Indonesia.

Tujuan TI-I mengadakan Survei Persepsi Korupsi di 12 kota guna memperoleh gambaran yang komprehensif atas persepsi pelaku usaha dan efektivitas pemberantasan korupsi di daerah yang dapat dibandingkan dengan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk menera upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kedepannya.

Dadang Trisasongko
Sekretaris Jenderal

Daftar Isi

6 1 PENDAHULUAN

7 2 METODOLOGI

10 3 HASIL SURVEI

- 10 3.1 Apakah itu Indeks Persepsi Korupsi/ IPK?
- 11 3.2 Bagaimana Nilai Indeks Persepsi Korupsi 12 kota 2017 dihitung?
- 12 3.3 Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2017
- 14 3.4 Daya Saing Lokal
- 15 3.5 Kemudahan Berusaha
- 16 3.6 Integritas Bisnis
- 17 3.7 Integritas Layanan Publik
- 21 3.8 Sistem Integritas Lokal
- 22 3.9 Literasi UU Tipikor dan Stranas PPK

24 4 PENUTUP

- 25 Kesimpulan
- 25 Rekomendasi

26 LAMPIRAN

- 26 Infografis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
- 28 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Jakarta Utara
- 30 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Pontianak
- 32 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Pekanbaru
- 34 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Balikpapan
- 36 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Banjarmasin
- 38 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Padang
- 40 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Manado
- 42 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Surabaya
- 44 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Semarang
- 46 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Bandung
- 48 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Makassar
- 50 Hasil Survei Persepsi 2017 Kota Medan

1. Pendahuluan

Praktik korupsi telah terbukti menimbulkan kerugian di banyak bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti dampak negatifnya terhadap perbaikan iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga meningkatkan kemiskinan. Berbagai cara telah diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengurangi praktik suap di kalangan pengusaha dan aparat pemerintah. Permasalahannya seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi khususnya di era otonomi daerah yang telah memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah, untuk mengurangi praktik korupsi antara pengusaha dan pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kenaikan, meski tidak terlalu optimis. Hal ini terafirmasi dalam laporan *Corruption Perception Index* (CPI) yang tiap tahun dikeluarkan oleh Transparency International.

Pada tahun 2016, menurut Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 pada rentang 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara yang disurvei.

Respon Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi salah satunya adalah membuat sebuah peta jalan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun.

Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK.

Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Pada tahun 2017 ini, Transparency International Indonesia kembali melakukan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi pada skala nasional yang terdiri dari 12 Kota besar yang disurvei. Secara umum IPK Kota 2017 ini hendak melihat sejauh mana kualitas tata kelola institusi publik dalam memberikan pelayanan publik dan pengetahuannya terhadap risiko korupsi.

Selain itu Survei IPK Kota 2017 ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu dan antar kota yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

2. Metodologi

Survei Persepsi Korupsi 2017 dilakukan di 12 (dua belas) Kota di Indonesia. Dua belas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru (1), Kota Semarang (2), Kota Banjarmasin (3), Kota Pontianak (4), Kota Makassar (5), Kota Manado (6), Kota Medan (7), Kota Padang (8), Kota Bandung (9), Kota Surabaya (10), Kota Jakarta Utara (11), dan Kota Balikpapan (12).

Pemilihan 12 Kota survei didasari pertimbangan berikut: Pertama, provinsi dimana kota survei berada memiliki kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto nasional. Kedua, kontribusinya produk domestik regional bruto provinsi dimana kota survei berada secara akumulatif mencapai hampir 70 persen produk domestik bruto nasional. Ketiga, 12 kota dipilih mempertimbangkan area persebaran kegiatan ekonomi sesuai metode zonasi atau kawasan. Yakni kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Responden Survei Persepsi Korupsi 2017 adalah pengusaha dan pelaku usaha. Pengusaha dan pelaku usaha yang terpilih sebagai responden dalam survei ini adalah pengusaha dan pelaku usaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, provinsi, kota, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Total sampel pengusaha dan pelaku usaha yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1.200 responden. Sampel tersebar secara proporsional di 12 Kota tersebut. Alokasi sampel untuk masing-masing strata dilakukan menggunakan metode alokasi sama. Survei menggunakan *margin of error* sebesar 2,8%.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *stratified random sampling*. Kerangka sampel pengusaha yang digunakan bersumber dari Direktori Sensus Ekonomi Nasional 2016, Direktori Survei IPK Kota 2015, dan Direktori Perusahaan di Dinas OPD (terutama Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, atau yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya) di masing-masing Kota.

Daerah pelaksanaan survei yang memiliki jumlah sampel kurang dari 100, maka kekurangan jumlah sampel dapat dipenuhi menggunakan metode *snowball* hingga jumlah minimal sampel terpenuhi. Dan jika daerah tersebut sudah maksimal dalam hal jumlah maka untuk memenuhi kuota 1.200 responden akan diambil dari sampel acak kota lainnya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan secara baku.

Pengambilan data dilakukan oleh enumerator melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuesioner survei. Kemudian enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal *online*.

Pengumpulan data Survei Persepsi Korupsi 2017 dilakukan oleh Transparency International Indonesia dibantu oleh koordinator wilayah survei serentak di 12 (dua belas) kota di Indonesia pada medio Juni hingga Agustus 2017.

Sebagai bagian dari proses validasi data survei, tim pemantau lapangan melakukan observasi lapangan dan melakukan audit terhadap 25% (dua puluh persen) data survei. Hasil observasi tim lapangan dan hasil audit survei menentukan kelanjutan proses pengolahan data.

Berdasarkan kuota yang ditetapkan untuk kota yang disurvei, maka diperoleh distribusi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

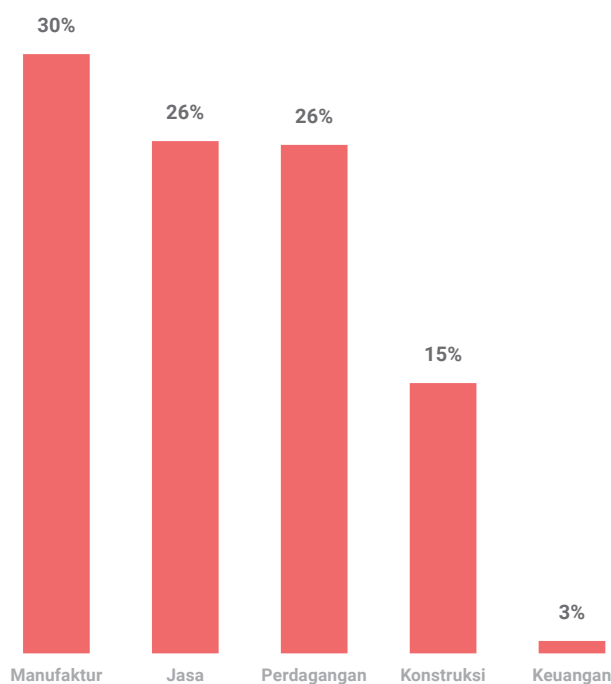
KOTA	RESPONDEN
Balikpapan	105
Semarang	100
Pekanbaru	100
Banjarmasin	100
Pontianak	100
Makassar	102
Medan	100
Padang	107
Bandung	101
Manado	80
Surabaya	101
Jakarta Utara	104
TOTAL	1200

Tabel 1.
Jumlah Responden Survei Persepsi Korupsi 2017 di 12 Kota

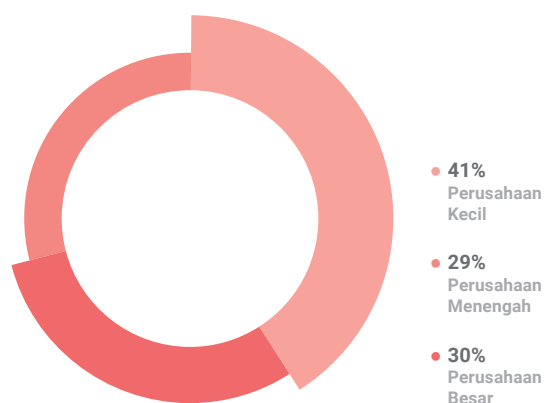
Dalam teknik pengambilan sampel, perusahaan distratifikasi dalam tiga kategori. Perusahaan masuk dalam kategori kecil jika memiliki jumlah pekerja hingga kurang atau sama dengan 49 pekerja, perusahaan masuk dalam kategori menengah jika memiliki jumlah pekerja antara 50 hingga 99 pekerja, dan perusahaan masuk dalam kategori besar jika memiliki jumlah pekerja di atas 100 pekerja.

Berikut adalah persentase kategori menurut skala usaha dalam Survei Persepsi Korupsi 2017

Grafik 2.
Persentase Sektor Industri



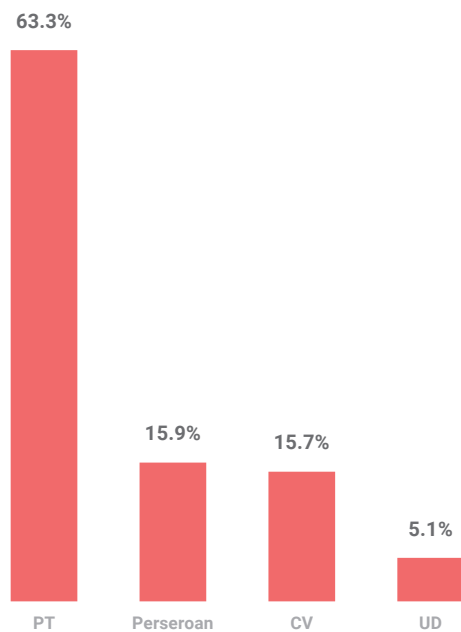
Dalam Survei Persepsi Korupsi 2017 perusahaan yang disurvei dibedakan dalam lima sektor industri utama. Berdasarkan sektor industri, persentase industri manufaktur ada 30%. Kemudian sektor Jasa dan Perdagangan terdapat 26%. Sektor Konstruksi sebesar 15% dan terakhir adalah sektor Keuangan dengan persentase sebesar 3%.



Grafik 1.
Persentase Skala Perusahaan

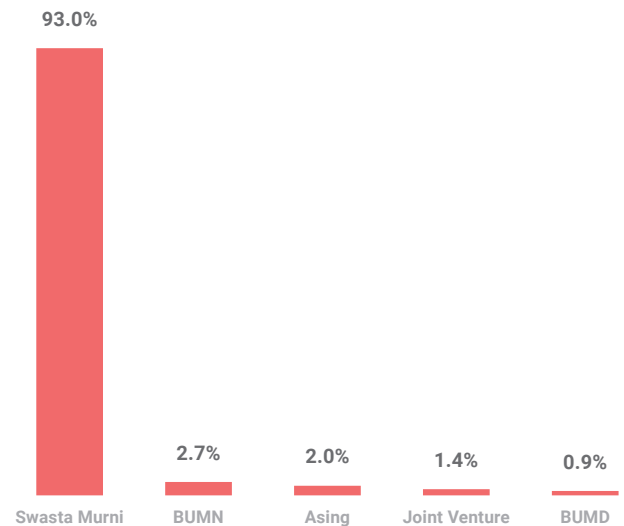
Pada Survei Persepsi Korupsi 2017 ini proporsi perusahaan berdasarkan klasifikasi bisa dikatakan dalam proporsi yang berimbang dimana 30% terdiri atas perusahaan skala besar, 29% perusahaan skala menengah dan 41% perusahaan skala kecil.

Grafik 3.
Status Badan Usaha

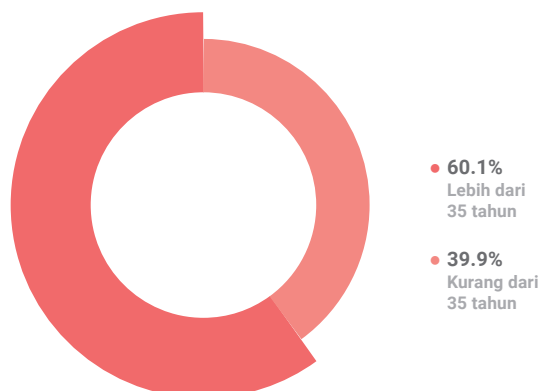


Menurut jenis badan hukum, perusahaan pada Survei Persepsi Korupsi 2017 dengan status badan usaha "Perseroan Terbatas" mendominasi sebagai responden survei, dengan persentase sebesar 63.3%. Untuk perusahaan dengan kepemilikan "Perseorangan" dan bentuk "CV" terdapat 15.9 dan 15.7%. Sedangkan perusahaan dengan bentuk "UD" terdapat 5.1%.

Grafik 4.
Perusahaan Berdasarkan Komposisi Modal



Pada Survei Persepsi Korupsi 2017 ini proporsi perusahaan berdasarkan komposisi modal didominasi dengan kepemilikan modal swasta murni dengan persentase 93.0%. Sedangkan pada skala minor terdapat BUMN, PMA, Joint Venture dan BUMD.



Grafik 5.
Pelaku Usaha Berdasarkan Usia

Dalam Survei Persepsi Korupsi 2017 ini usia responden yang berhasil diwawancara sebanyak 60.1% berusia lebih dari 35 tahun dan 39.9% berusia kurang dari 35 tahun.

3.

Hasil Survei

3.1 APAKAH ITU INDEKS PERSEPSI KORUPSI/ IPK?

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merefleksikan pandangan pelaku usaha dari kota-kota tersurvei. Indeks dibentuk dari hubungan perusahaan (pelaku usaha) dan pemerintah daerah dalam melakukan proses bisnis.

Dalam hal ini nilai yang lebih tinggi merupakan indikator bahwa responden memberikan penilaian yang baik, sementara nilai rendah mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa di daerahnya praktik korupsi masih tinggi. Dengan demikian, IPK merepresentasikan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerahnya.

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan Survei Persepsi Korupsi 2017 adalah sebagai berikut:

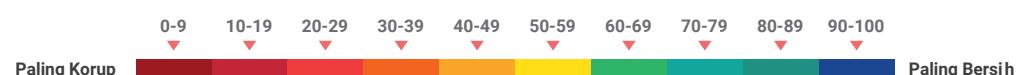
- 1 Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Persepsi Korupsi 2017 mengacu pada dimensi-dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam *Corruption Perception Index* (CPI).
- 2 Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.
- 3 Daya Saing Lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi atau pun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain.
- 4 Hambatan Berusaha adalah kekuatan yang dinilai menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah.
- 5 Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. Dalam Survei Persepsi Korupsi 2017, potensi korupsi dapat terjadi akibat 5 hal: prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi di daerah.
- 6 Prevalensi Korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal; dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal.
- 7 Akuntabilitas Pendanaan Publik adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standar prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi *non budgeter* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah ada independensi pengadilan yang menindak pejabat korup.
- 8 Motivasi Korupsi adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan dana *off budget* untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli pengaruh.
- 9 Sektor Terdampak Korupsi adalah penilaian terhadap sektor publik apa saja terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif.

- 10 Efektivitas Program Antikorupsi adalah penilaian terhadap seberapa tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi.
- 11 Integritas Publik adalah penilaian terhadap pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga publik baik di tingkat pusat, vertikal, provinsi, kota, ataupun BUMN/BUMD. Proses penilaian integritas publik dilengkapi dengan pengukuran tingkat kesesuaian prosedur layanan dan implementasi layanan, intensitas pelaporan kejadian maladministrasi, dan preferensi seseorang untuk melakukan penyuapan.
- 12 Potensi Suap adalah penilaian terhadap seberapa besar dampak suap terhadap praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi pembayaran suap dalam survei ini diidentifikasi melalui seberapa besar persentase kompetisi bisnis yang dimenangkan melalui praktik suap menyuap.
- 13 Integritas Bisnis adalah penilaian terhadap infrastruktur pencegahan korupsi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan oleh pengusaha. Bisnis yang memiliki integritas bisnis dinilai mampu mengurangi risiko korupsi melalui penguatan komitmen perusahaan disertai dengan implementasi pilar-pilar bisnis berintegritas misalnya kepemilikan kode etik, kode perilaku, kebijakan antikorupsi, program antikorupsi konflik kepentingan, pelatihan antikorupsi, dan saluran *whistle-blowing system*.
- 14 Risiko Suap Berdasar Lapangan Usaha adalah penilaian terhadap risiko kejadian suap yang dikategorisasikan berdasarkan jenis lapangan usaha yang aktif berusaha di kota tempat pelaksanaan survei. Jenis suap yang diidentifikasi dalam survei ini adalah jenis suap, gratifikasi, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar sektor swasta.
- 15 Sistem Integritas Lokal adalah penilaian terhadap ekspektasi, kapasitas, peran, dan kualitas tata kelola masing-masing aktor kunci dalam pemberantasan korupsi di daerah yang dapat berkontribusi terhadap efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
- 16 Pengetahuan Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah penilaian terhadap kesadaran pengusaha tentang keberadaan UU Tipikor, pemahaman pengusaha tentang klasifikasi jenis korupsi dalam UU Tipikor, dan menilai prevalensi jenis korupsi tersebut.
- 17 Pengetahuan Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) adalah penilaian tentang keberadaan Stranas PPK dan Aksi PPK Daerah, serta menilai efektivitas masing-masing strategi dalam Stranas PPK.

3.2 BAGAIMANA NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI 12 KOTA 2017 DIHITUNG?

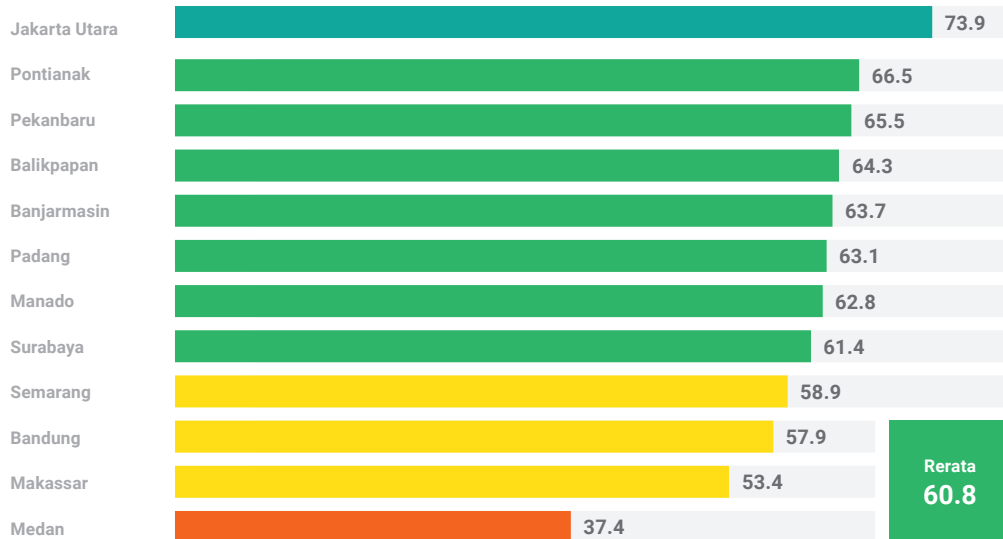
Dalam survei ini potensi korupsi dikenali dalam 5 (lima) kategori: prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi. Kategori-kategori tersebut dianggap mewakili interaksi korupsi yang terjadi antara pengusaha dan pejabat publik.

Nilai indeks diukur dalam skala 0 sampai dengan 100. Di mana angka 0 merefleksikan paling korup dan 100 dinilai sebagai bebas korupsi.



3.3 HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2017

Grafik 6.
Indeks Persepsi
Korupsi 2017 12
Kota di Indonesia

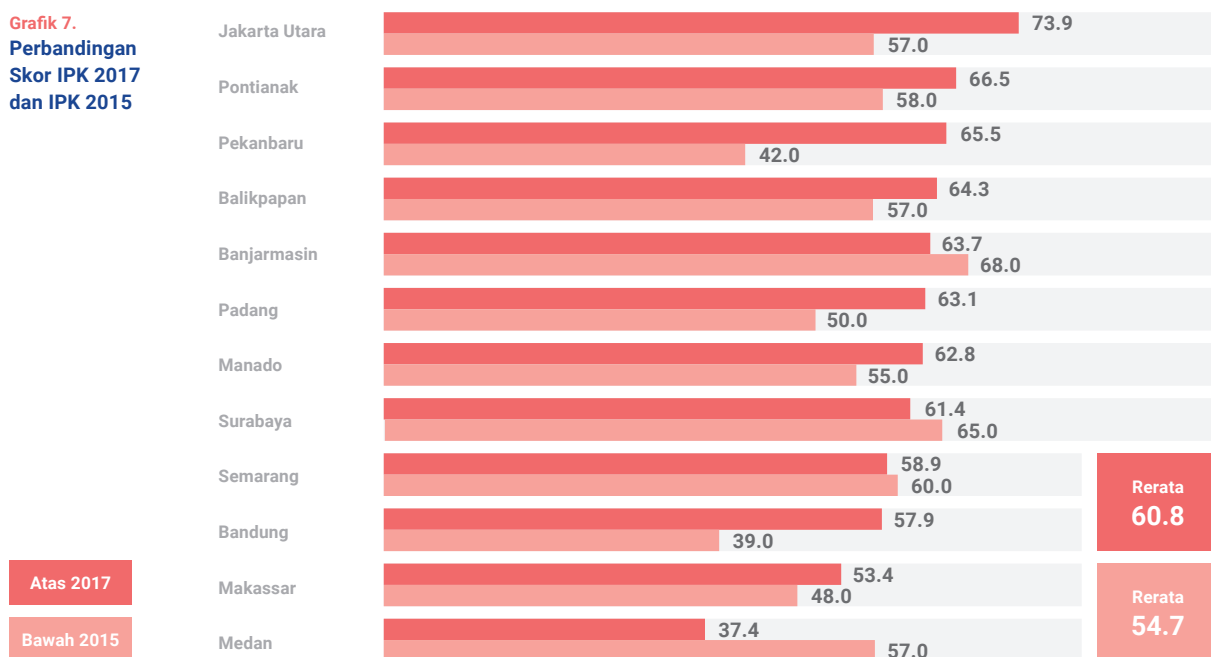


Berdasarkan perhitungan IPK 2017, dapat dilihat bahwa di antara 12 kota yang disurvei, Jakarta Utara memiliki IPK yang paling tinggi dengan nilai 73.9 poin. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pelaku usaha di Jakarta Utara menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi sangat baik. Sedangkan IPK

terendah dari kota Medan dengan nilai 37.4 poin, dimana para pelaku usaha menilai masih banyak terjadi korupsi.

Rerata Indeks Persepsi Korupsi tahun 2017 ini berada pada poin 60.8. Pada rentang 0–100, rerata 60.8 menandakan berada tipis di atas rata-rata.

Grafik 7.
Perbandingan
Skor IPK 2017
dan IPK 2015



Indeks Persepsi Korupsi 2017 bisa diperbandingkan dengan IPK 2015. Di mana perbandingan ini dilakukan dengan menilai besarnya peningkatan atau penurunan Indeks Persepsi Korupsi. Kota dengan pertumbuhan indeks persepsi korupsi tinggi menunjukkan daerah yang bersangkutan memiliki kemajuan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya. Sebaliknya, daerah yang cenderung stagnan/penurunan indeks persepsi korupsinya menunjukkan stagnasi/penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Sebagai contoh dalam kota dengan IPK yang memiliki peningkatan skor indeks persepsi korupsi paling besar adalah Kota Pekanbaru dengan skor 42.0 di tahun 2015 dan 65.5 pada tahun 2017. Sementara itu, daerah yang memiliki penurunan skor indeks persepsi korupsi paling drastis adalah Kota Medan dengan skor 57.0 di tahun 2015 dan 37.4 pada tahun 2017.

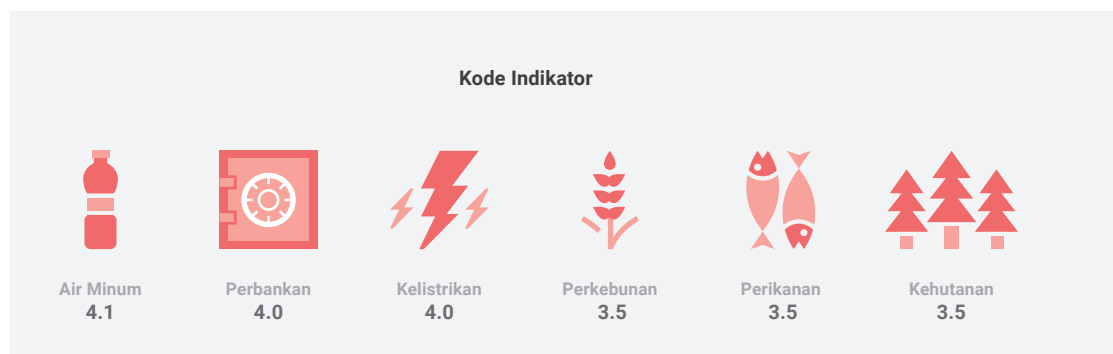
Grafik 8.
Komponen
Penyusun IPK



Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2017, komponen penyusun rerata IPK 12 kota menunjukkan bahwa komponen yang paling mempengaruhi tingginya indeks adalah efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan motivasi korupsi masih ditemukan sebagai salah satu faktor penyebab korupsi.

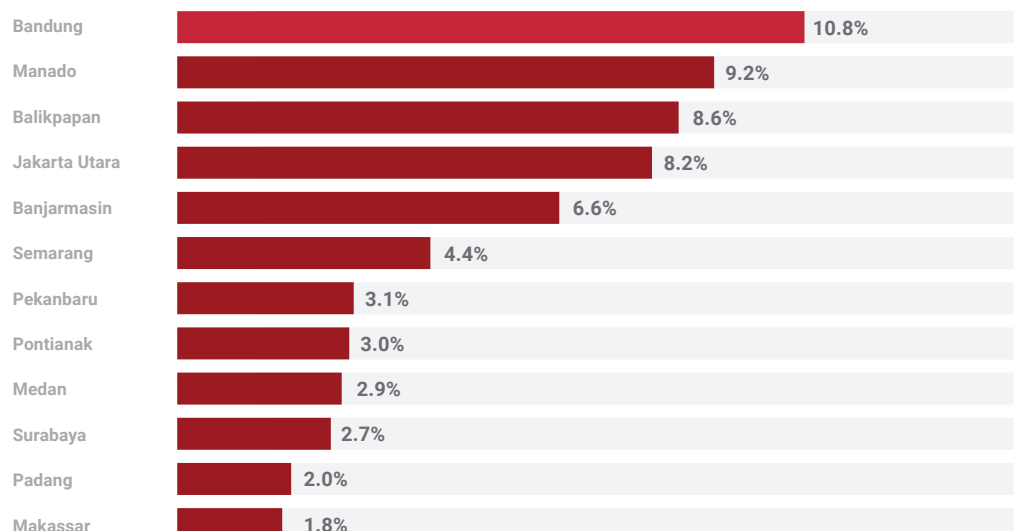
Grafik 9.
Persepsi Suap
Berdasarkan
Lapangan Usaha

Blok Risiko Suap Berdasarkan Lapangan Usaha



Jika potensi korupsi diukur sebagai pendekatan atas sisi permintaan korupsi, potensi suap diukur sebagai pendekatan atas sisi penawaran korupsi. Dalam survei ini potensi suap dihitung melalui dua cara: menghitung prevalensi dan jenis suap; menghitung besar biaya suap. Dari skala 0-5 dimana 0 berarti sangat lazim dan 5 berarti tidak lazim, sektor lapangan usaha yang memiliki persepsi suap terendah adalah sektor penyediaan air minum dengan skor 4.1, perbankan dan kelistrikan dengan skor persepsi suap sebesar 4.0. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap tertinggi adalah kehutanan, perikanan dan perkebunan dengan skor persepsi suap sebesar 3.5.

Grafik 10.
Persentase Nilai
Suap per Kota



Perbedaan kapasitas ekonomi antarkota mengakibatkan potensi dampak korupsi dan potensi suap berbeda antar wilayah survei. Daerah dengan potensi korupsi tinggi dan potensi suap tinggi memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, potensi korupsi dan potensi suap rendah memiliki potensi dampak ekonomi yang rendah.

Penilaian prevalensi dan jenis suap dilakukan dengan menilai persepsi responden tentang suap, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar swasta di kota pelaksanaan survei. Pembedaan keempat jenis suap ini dengan dasar adanya perbedaan tentang gradasi nilai dan intensi pemberian suap. Kota dengan prevalensi tinggi untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap tinggi, sebaliknya kota dengan prevalensi rendah untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap rendah.

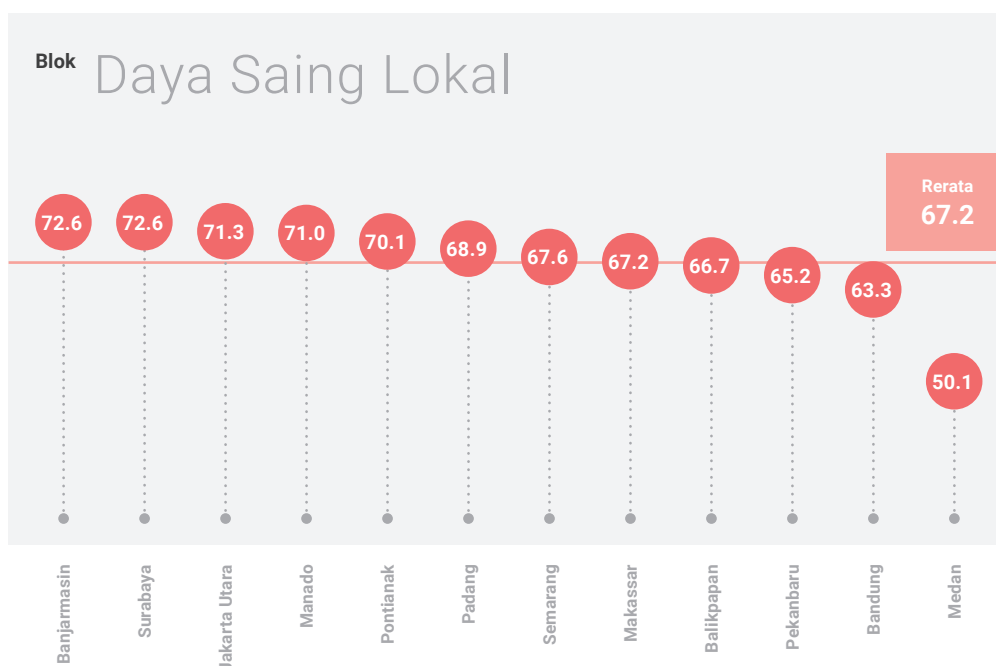
Penilaian potensi suap berikutnya diperoleh melalui perhitungan rerata alokasi suap yang dibayarkan oleh perusahaan. Kota dengan rerata alokasi suap terbesar memiliki potensi suap tertinggi, sebaliknya kota dengan alokasi suap rendah memiliki potensi suap yang rendah pula.

Berdasarkan nilai suap, kota yang memiliki persentase suap tertinggi adalah Kota Bandung sebesar 10.8% dari total biaya produksi. Sementara itu, kota yang memiliki persentase biaya suap terendah adalah Kota Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.

3.4 DAYA SAING LOKAL

Daya Saing Lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Komponen daya saing lokal yang dinilai dalam survei ini mencakup efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, inovasi bisnis, kapasitas birokrasi, kapasitas infrastruktur, kematangan sektor bisnis, kesiapan teknologi, ketersediaan pasar keuangan, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan tinggi, serta kualitas pengendalian inflasi. Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain.

Grafik 10.
Indeks Daya
Saing Lokal 12
Kota



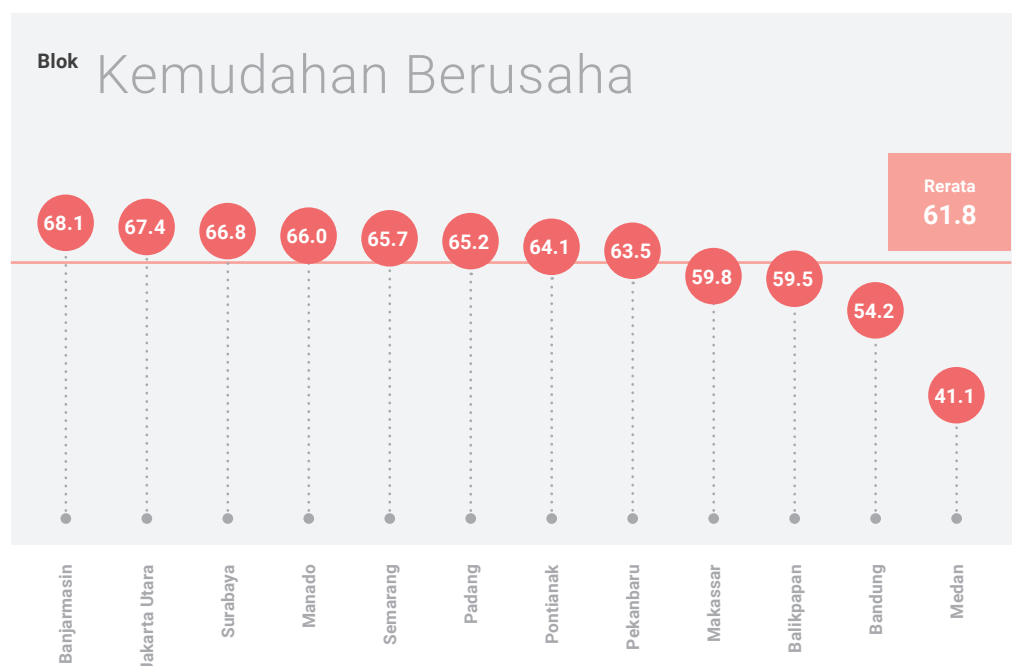
Diantara kota yang disurvei secara relatif, Kota Banjarmasin menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan persepsi daya saing lokal tertinggi dengan nilai 72.6 poin. Sementara Kota Medan menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi daya saing terendah. Peningkatan ini didasari atas akumulasi skor masing-masing unsur daya saing di masing-masing kota.

Bagian penting dalam meningkatkan kualitas daya saing lokal adalah efektivitas pemberantasan korupsi daerah. Terdapat bukti empirik bahwa persepsi korupsi berhubungan erat dengan daya saing. Kota dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing yang tinggi pula. Sebaliknya, kota dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki daya saing yang rendah pula.

3.5 KEMUDAHAN BERUSAHA

Kemudahan berusaha adalah kekuatan yang dinilai mendukung dan/atau menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Aspek kemudahan berusaha yang diukur mencakup akses infrastruktur, akses permodalan, birokrasi, inflasi, banyaknya kriminalitas, tingkat pembebasan lahan, konflik ketenagakerjaan, kondisi stabilitas politik dan tarif pajak. Penilaian kemudahan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah

Grafik 11.
Indeks
Kemudahan
Berusaha 12 Kota



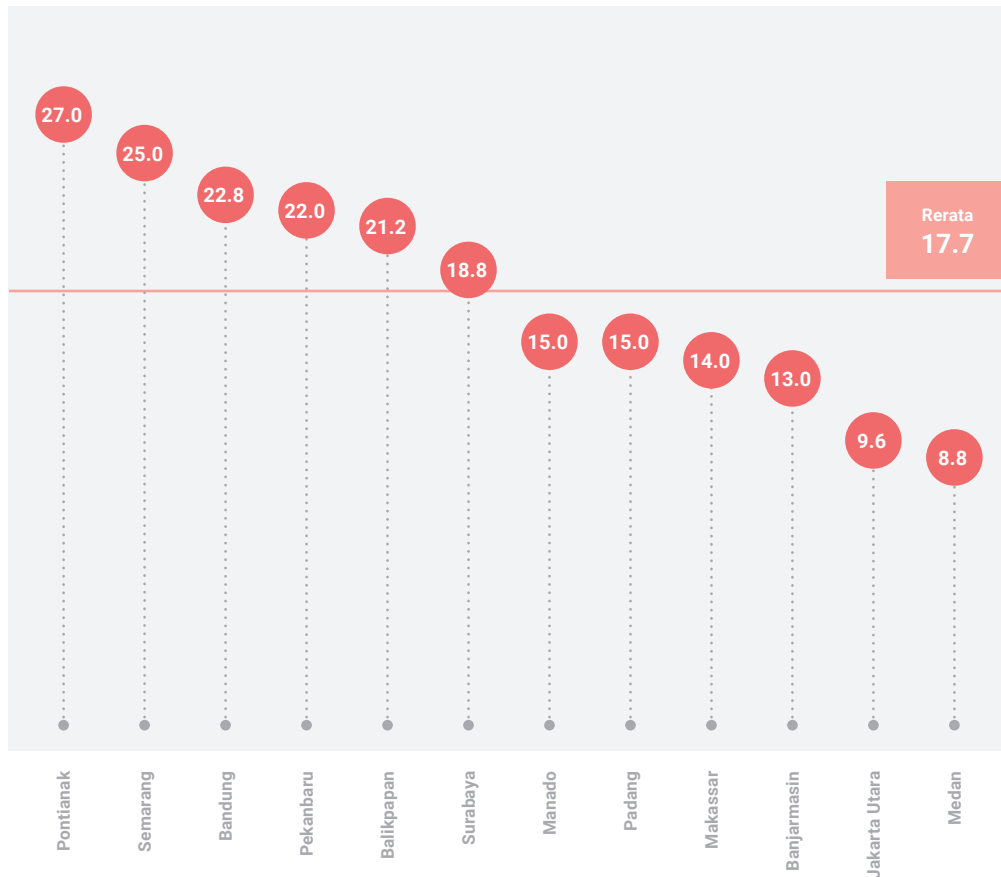
Tidak hanya unsur daya saing lokal, para pelaku usaha juga memberikan penilaian tentang hambatan kemudahan berusaha di masing-masing kota survei. Masing-masing pengusaha diminta untuk memberikan penilaian terhadap unsur penghambat daya saing tersebut. Pengusaha diminta untuk menilai seberapa kuat unsur daya saing tersebut dengan kriteria sebagai berikut 0 jika sangat buruk dan 100 jika sangat baik.

Di antara kota yang disurvei, Kota Banjarmasin menduduki peringkat teratas kota dengan persepsi kemudahan berusaha. Sementara Kota Medan menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi kemudahan berusaha terendah. Pemeringkatan ini didasari atas akumulasi skor masing-masing unsur kemudahan berusaha di masing-masing kota.

3.6 INTEGRITAS BISNIS

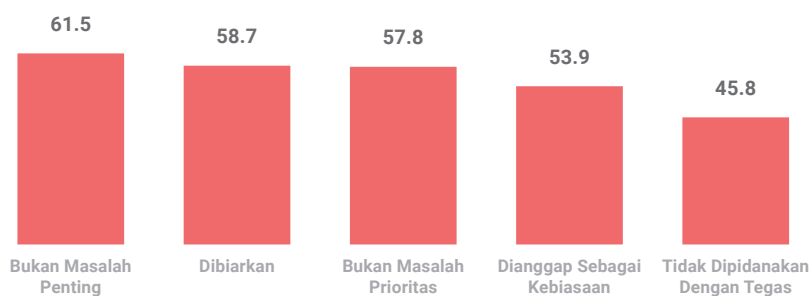
Integritas bisnis memiliki relasi yang erat dengan potensi suap. Daerah dengan integritas bisnis yang buruk memiliki potensi suap yang tinggi. Dalam survei ini integritas bisnis dihitung berdasarkan jumlah kompetisi bisnis yang terdistorsi oleh praktik suap. Kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tertinggi memiliki integritas bisnis yang buruk, sementara kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah memiliki integritas bisnis rendah.

Grafik 12.
Persentase
Pelaku Usaha
Kalah Karena
Suap



Kota dengan integritas bisnis yang buruk ditandai dengan persentase kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tertinggi adalah Kota Pontianak sebanyak 27%. Sementara itu, kota yang kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah adalah Kota Makassar sebanyak 8.8%.

Grafik 13.
Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi

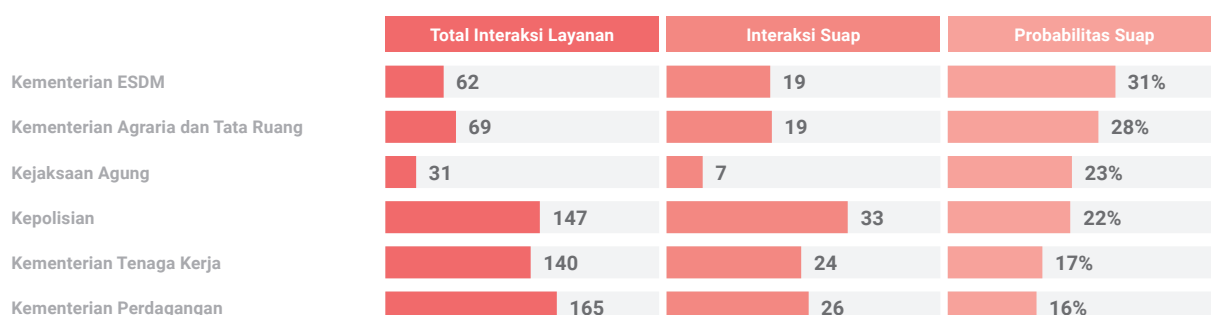


Terdapat 5 hal yang dinilai pengusaha sebagai jerat korupsi. Akibat keberadaan hal tersebut korupsi masih terus terjadi dan berulang. Kelima hal tersebut adalah korupsi tidak dianggap sebagai fenomena penting (61.5%), korupsi dibiarkan (58.7%), korupsi tidak dianggap sebagai prioritas kebijakan (57.8%), dan korupsi dianggap sebagai kebiasaan (53.9%). Dan yang terakhir korupsi tidak dipidana secara tegas (45.8%).

3.7 INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK

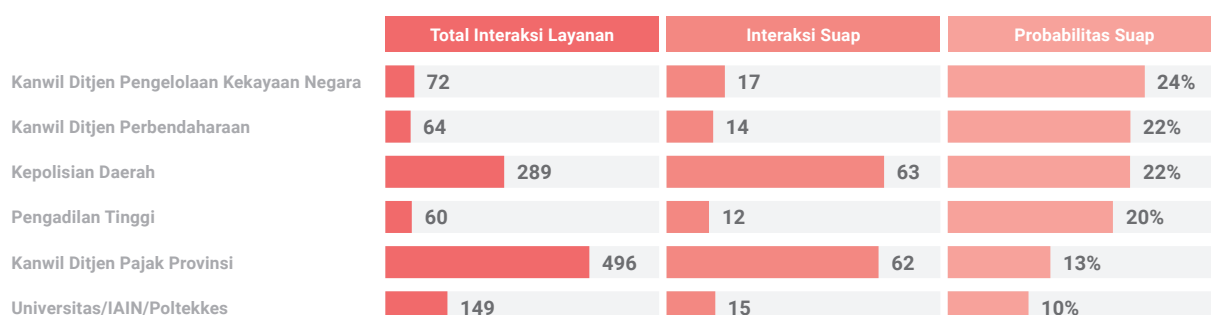
Integritas publik memiliki relasi yang erat dengan potensi korupsi. Daerah dengan integritas publik yang buruk memiliki potensi korupsi yang tinggi. Pada bagian ini ditanyakan tentang risiko pelanggaran integritas publik. Penilaian risiko pelanggaran integritas dilakukan dengan dua indikator. Pertama, menghitung insiden suap di masing-masing instansi publik. Semakin tinggi insiden penyuapan, maka integritas publik akan semakin buruk. Kedua, menghitung probabilitas penyuapan yang merupakan perbandingan antara insiden suap dengan total interaksi layanan publik.

Semakin tinggi probabilitas penyuapan, maka integritas publik akan semakin buruk.



Grafik 14.
Integritas
Layanan Publik
Pusat

Dengan dasar penilaian tentang probabilitas suap dalam 12 (dua belas) bulan terakhir maka instansi pusat yang memiliki risiko pelanggaran integritas layanan publik tertinggi adalah Kementerian ESDM dengan probabilitas suap sebesar 31%, di mana total interaksi layanannya sejumlah 62 interaksi dengan insiden interaksi suap sebesar 19 kejadian. Sementara itu, instansi pusat yang memiliki risiko terendah adalah Kementerian Perdagangan dengan probabilitas suap sebesar 16%, di mana dengan total interaksi layanan sebesar 165 interaksi dan interaksi suapnya sebesar 26 kejadian.



Grafik 15.
Integritas
Layanan Vertikal

Instansi layanan vertikal yang memiliki probabilitas suap tertinggi adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dengan probabilitas suap sebesar 24%, di mana dengan total interaksi layanan sebanyak 72 interaksi dan interaksi suap sebesar 17 kejadian. Sementara itu, instansi vertikal yang memiliki probabilitas suap terendah adalah Universitas/IAIN/Poltekkes dengan probabilitas suap sebesar 10%, di mana dengan total interaksi layanan sebesar 149 interaksi dan interaksi suap sebesar 15 kejadian.

	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan dan Energi	69	24	35%
Kepolisian	268	59	22%
Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi	141	22	16%
Dinas Lingkungan Hidup	145	22	15%
Dinas Perdagangan	289	38	13%
Perizinan Terpadu Satu Pintu	323	42	13

Grafik 16.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi

Instansi layanan Provinsi yang memiliki probabilitas suap tertinggi adalah Dinas Pertambangan dengan probabilitas suap sebesar 35%, di mana dengan total interaksi layanan sebanyak 69 interaksi dan interaksi suap sebesar 24 kejadian. Sementara itu, instansi Provinsi yang memiliki probabilitas suap terendah adalah Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perdagangan dengan probabilitas suap sebesar 13%, di mana dengan total interaksi layanan di PTSP sebesar 323 interaksi dengan interaksi suap sebesar 42 kejadian. Sedangkan total interaksi layanan di Dinas Perdagangan sebesar 289 kejadian dengan interaksi suap sebesar 38 kejadian.

	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan dan Energi	69	22	32%
Dinas Perhubungan	176	37	21%
Dinas Tata Ruang dan Bangunan	205	41	20%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	691	88	13%
Dinas Perdagangan	519	62	12%
Dinas Ketenagakerjaan	403	37	9%

Grafik 17.
Integritas Layanan Kota

Instansi layanan Kota yang memiliki probabilitas suap tertinggi adalah Dinas Pertambangan dengan probabilitas suap sebesar 32%, di mana dengan total interaksi layanan sebanyak 69 interaksi dan interaksi suap sebesar 22 kejadian. Sementara itu, instansi layanan kota yang memiliki probabilitas suap terendah adalah Dinas Ketenagakerjaan dengan probabilitas suap sebesar 9%, di mana total interaksi layanan sebesar 403 interaksi dengan interaksi suap sebesar 37 kejadian.

	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
PELNI	69	8	12%
Kereta Api Indonesia	70	8	11%
PLN	772	83	11%
Pelindo I/II/III/IV	116	12	10%
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	746	74	10%
Telkom	621	57	9%

Grafik 18.
Integritas Layanan BUMN/ BUMD

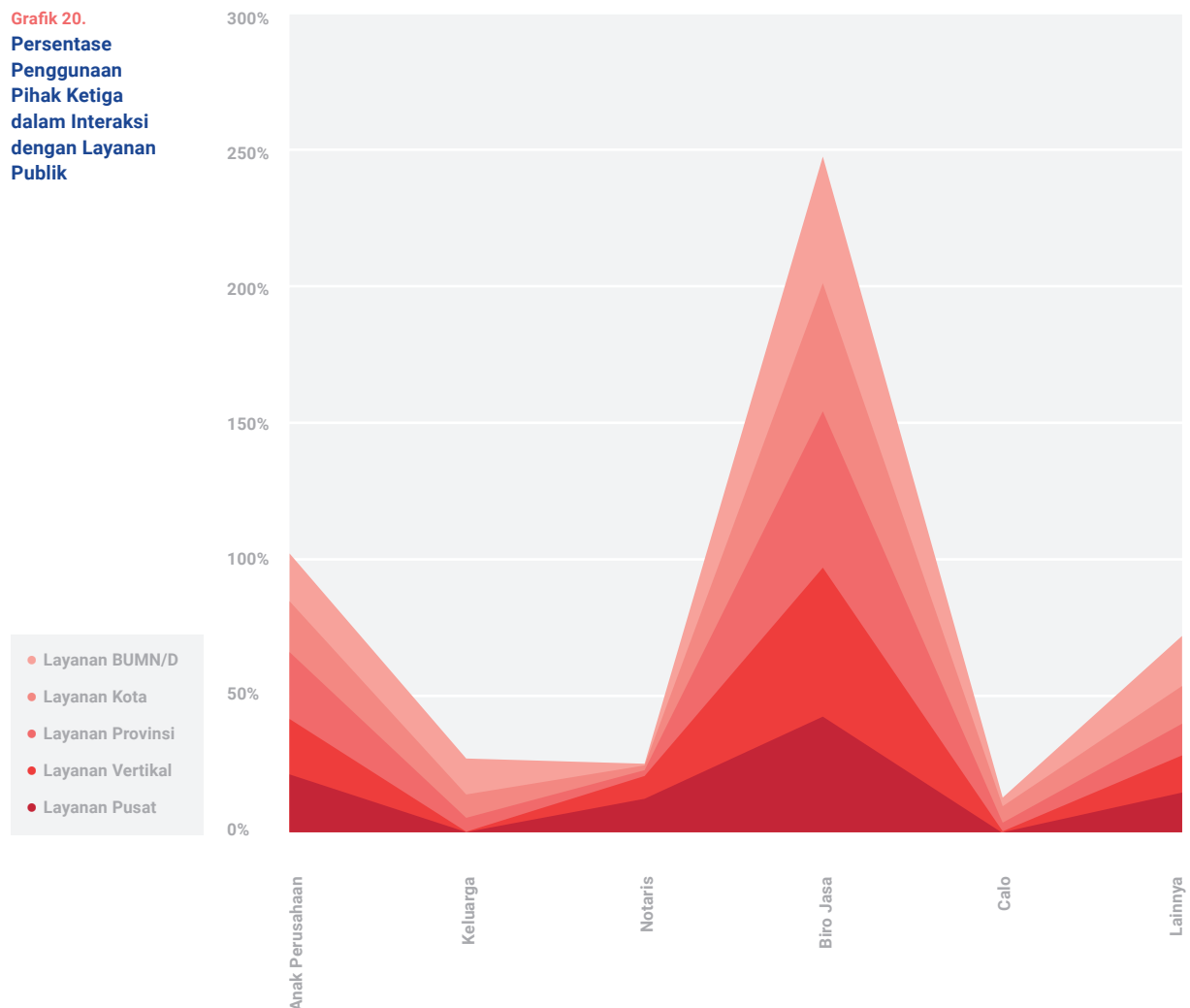
Instansi layanan BUMN/BUMD yang memiliki probabilitas suap tertinggi adalah PT Pelni dengan probabilitas suap sebesar 12%, di mana dengan total interaksi layanan sebanyak 69 interaksi dan interaksi suap sebesar 8 kejadian. Sementara itu, instansi layanan BUMN/BUMD yang memiliki probabilitas suap terendah adalah PT Telkom dengan probabilitas suap sebesar 9%, di mana total interaksi layanan sebesar 621 interaksi dengan interaksi suap sebesar 57 kejadian.

	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Asosiasi Pengusaha Indonesia	257	26	10%
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional	177	20	11%
Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia	142	32	23%

Grafik 19.
Integritas
Asosiasi
Pengusaha

Maraknya pertumbuhan organisasi profesi di kalangan pengusaha tentu saja memberikan peluang bagi situasi korupsi. Asosiasi pengusaha yang memiliki probabilitas penyuapan tertinggi adalah Asosiasi Lembaga pemberi jasa sertifikasi dengan probabilitas suap sebesar 23%, Lembaga pengembangan dengan probabilitas suap sebesar 11%, dan Asosiasi pengusaha dengan probabilitas suap sebesar 10%.

Grafik 20.
Persentase
Penggunaan
Pihak Ketiga
dalam Interaksi
dengan Layanan
Publik

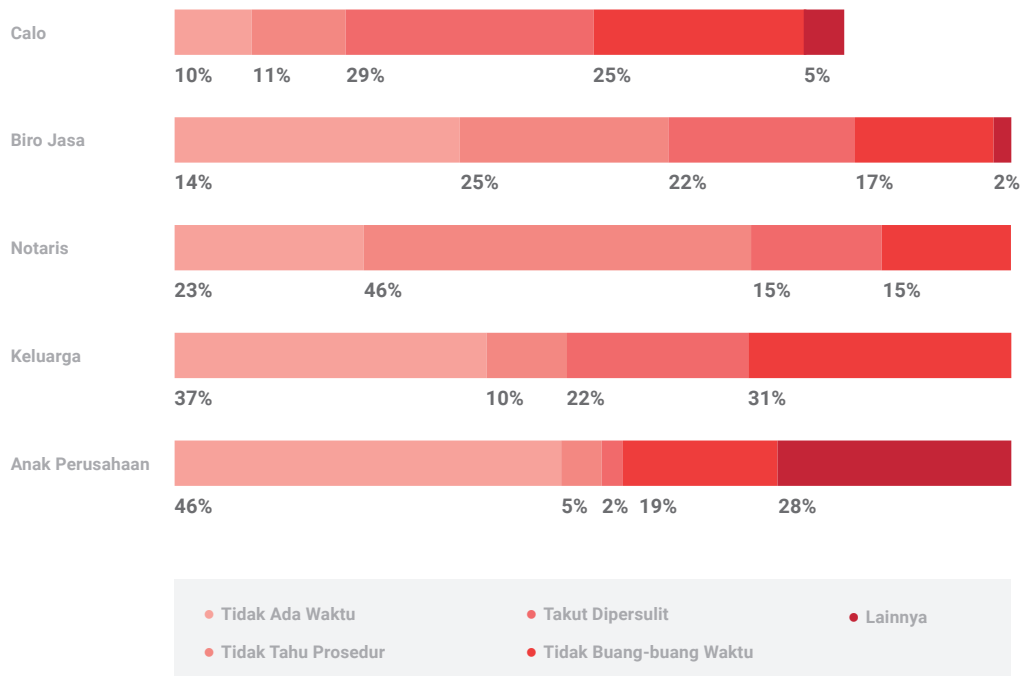


Sementara itu pada Survei Persepsi Korupsi 2017 ini dikembangkan satu buah pertanyaan tentang pemanfaatan jasa pihak ketiga saat pelaku usaha berinteraksi dengan layanan publik.

JENIS	LAYANAN PUSAT	LAYANAN VERTIKAL	LAYANAN PROVINSI	LAYANAN KOTA	LAYANAN BUMN/D
Anak perusahaan	23%	20%	23%	19%	17%
Keluarga	2%	2%	3%	9%	15%
Notaris	15%	8%	2%	2%	1%
Biro jasa	45%	54%	58%	46%	48%
Calo	0%	2%	3%	7%	3%
Lainnya	16%	14%	10%	16%	16%

Pemanfaatan pihak ketiga paling besar adalah saat responden mengakses layanan publik di tingkat Provinsi, di mana 58% menggunakan Biro Jasa untuk mengakses layanan tersebut.

Grafik 21.
Alasan
Penggunaan
Pihak Ketiga



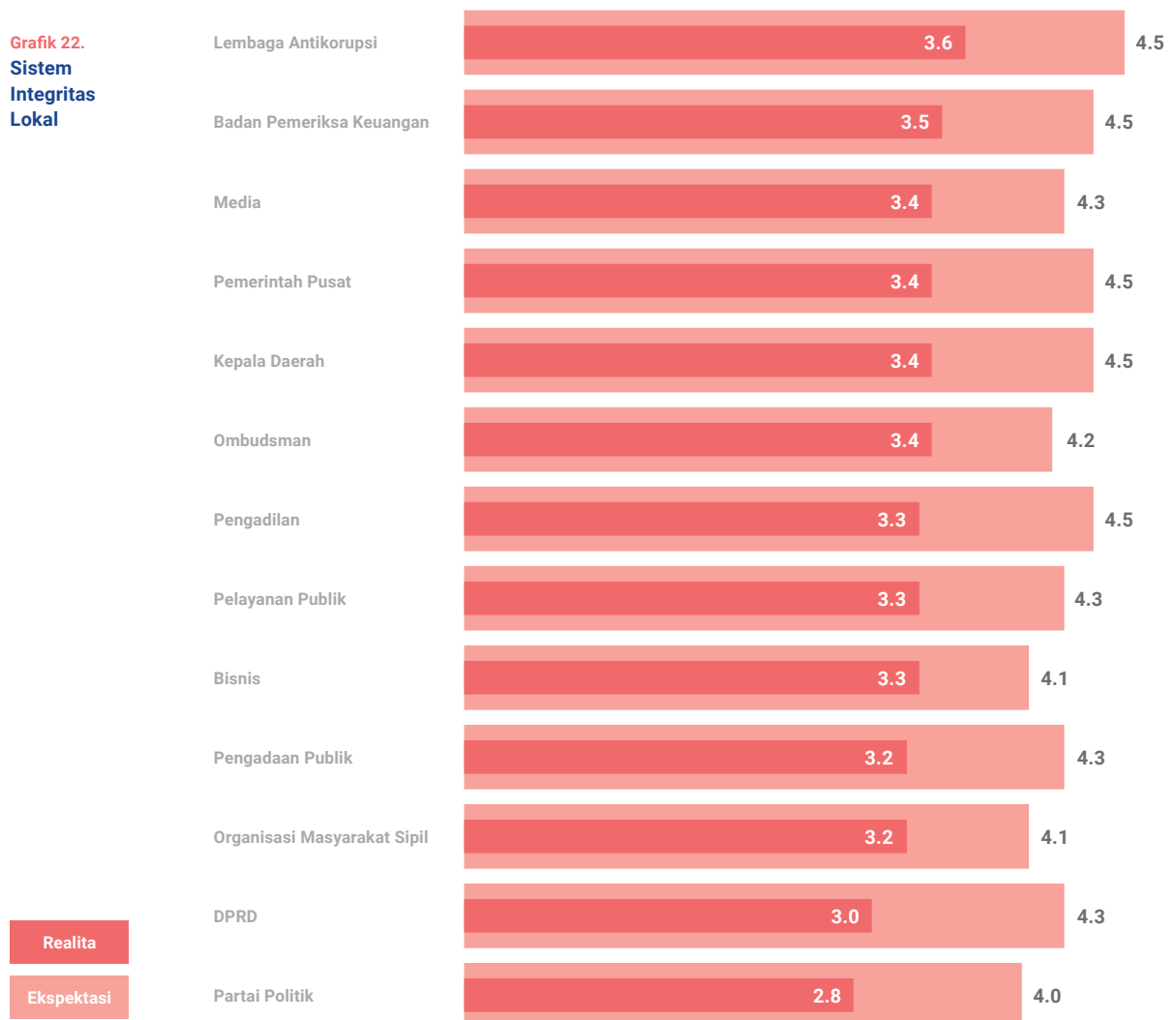
Ketika responden ditanyakan lebih jauh tentang alasan menggunakan jasa pihak ketiga sebagian besar (46%) menyatakan karena tidak ada waktu dan tidak tahu prosedur. Hanya sebagian kecil (2%) yang menjawab takut dipersulit.

3.8 SISTEM INTEGRITAS LOKAL

Korupsi dinilai terjadi secara sistemik, sehingga perlu pendekatan sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. pemetaan sistematis perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga mengevaluasi pilar mana yang paling memiliki peran, kapasitas, dan tata kelola dalam pemberantasan korupsi. Semakin tinggi gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin lemah sistem integritas lokal. Sebaliknya, semakin rendah gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin kuat sistem integritas lokal.

Pilar-pilar sistem integritas lokal yang dinilai dalam survei ini terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Partai Politik, Pelayanan Publik, Pengadaan Publik, Pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Media, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Antikorupsi Bisnis, Pemerintah Pusat.

Grafik 22.
Sistem
Integritas
Lokal



Dalam hal ekspektasi, Lembaga Antikorupsi merupakan lembaga yang dinilai paling penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan Pemerintah Pusat, Kepala Daerah dan Pengadilan juga dianggap sebagai pilar sistem integritas yang mampu menurunkan risiko korupsi. Kombinasi antar pilar yang dimiliki oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat membuka harapan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah.

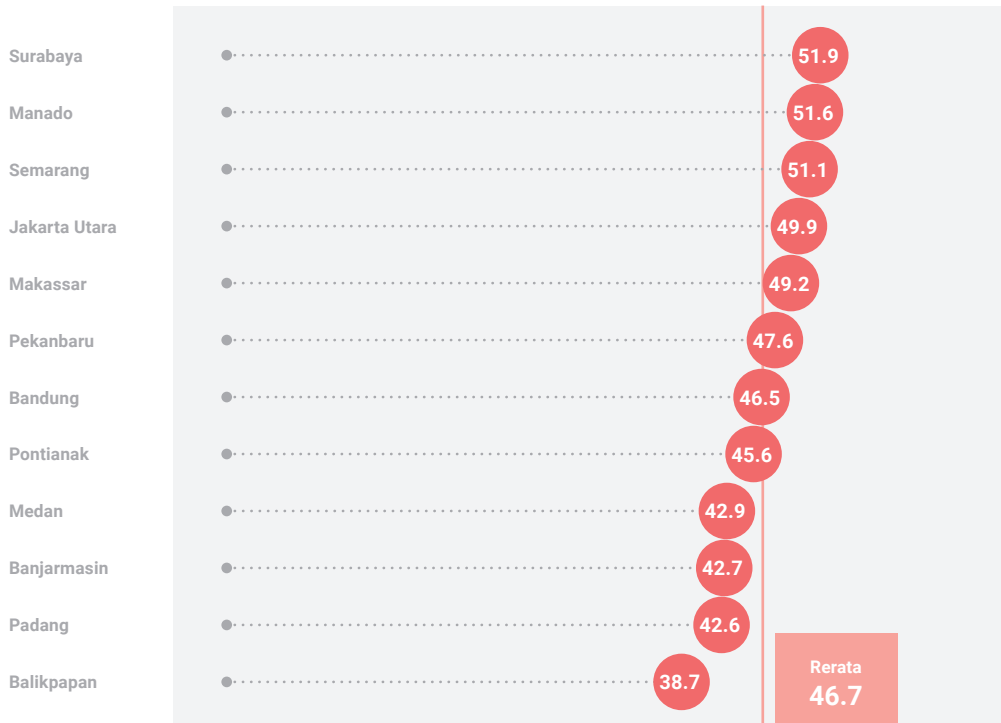
Di lain sisi dari aspek kemampuan, peran, dan tata kelola sistem integritas lokal, Lembaga Antikorupsi dipercaya oleh responden memiliki mempunyai kompetensi yang sangat signifikan. Sedangkan Partai Politik dianggap mempunyai kemampuan, peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi yang rendah.

3.9 LITERASI UU TIPIKOR DAN STRANAS PPK

Keberadaan UU Tipikor dan Stranas PPK dipandang penting oleh sejumlah kalangan. Sejumlah aksi dan terobosan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa dikatakan sebagai sebuah capaian yang menjadi tolok ukur dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

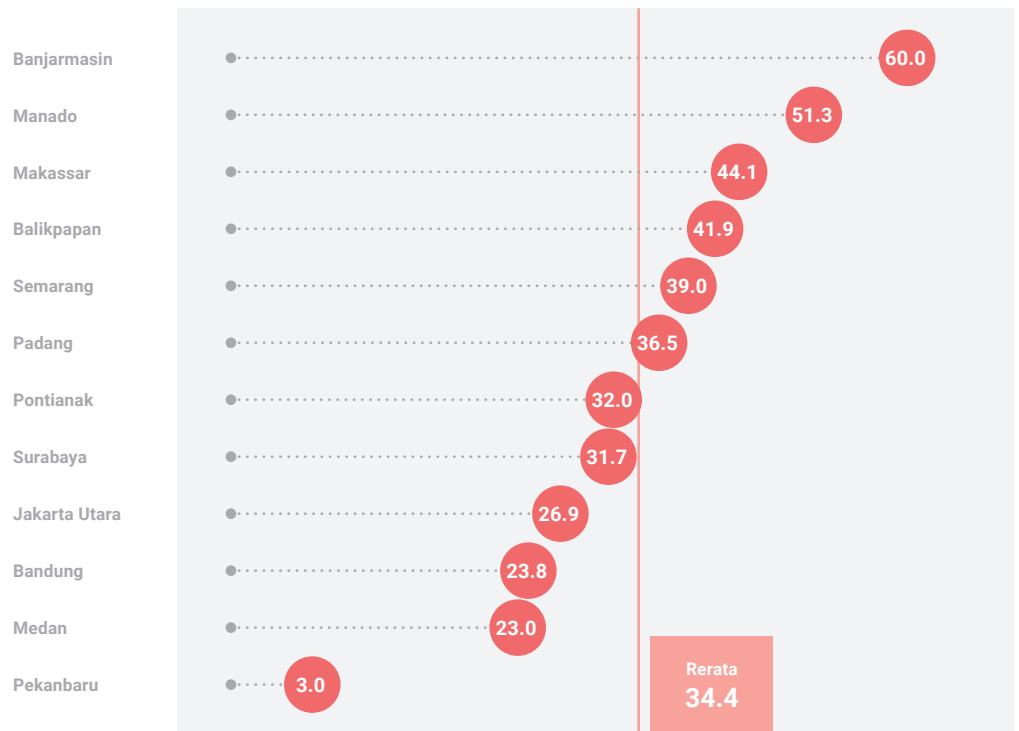
Terkait dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap instrumen pencegahan dan pemberantasan korupsi, Survei Persepsi Korupsi 2017 ini juga menanyakan perihal literasi responden terhadap pranata kebijakan antikorupsi tersebut.

Grafik 23.
Persentase
Pelaku Usaha
yang Tahu UU
Tipikor



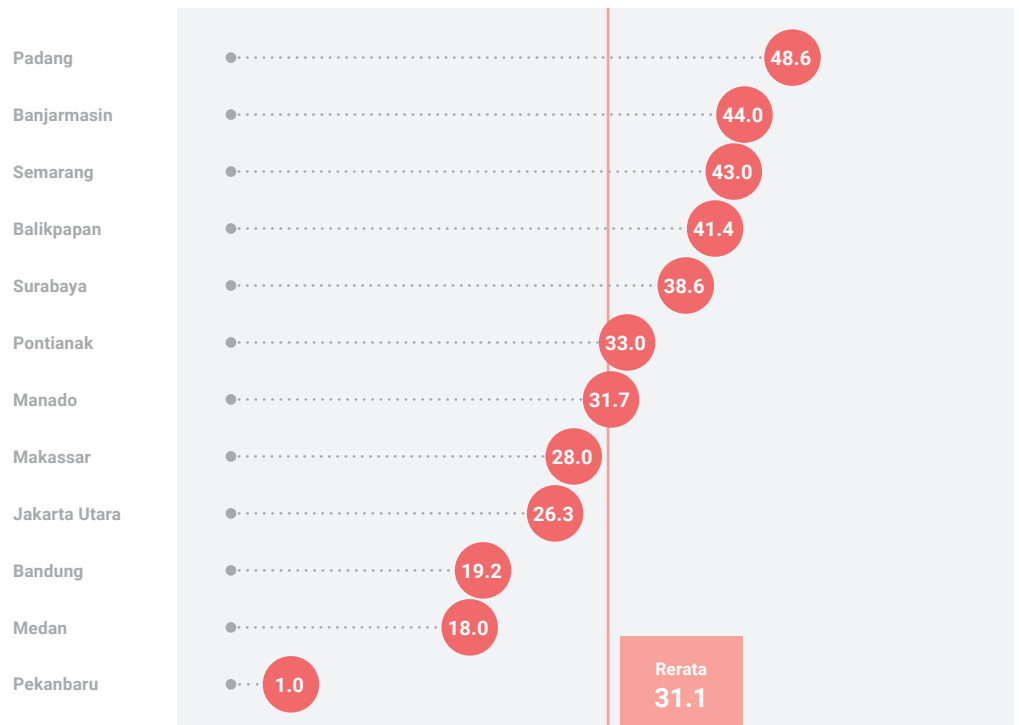
Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai UU Tipikor terbesar secara persentase. Di mana 51.9% pelaku usaha di Kota Surabaya mengaku mengetahui UU Tipikor. Sedangkan Kota Balikpapan dinilai dengan persentase terkecil dalam hal tingkat literasi pelaku usaha terhadap UU Tipikor yakni 38.7%.

Grafik 24.
Persentase
Pelaku Usaha
yang Tahu
Stranas PPK



Kota Banjarmasin merupakan kota dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai Stranas PPK terbesar secara persentase. Di mana 60.0% pelaku usaha di Kota Banjarmasin mengaku mengetahui Stranas PPK. Sedangkan Kota Pekanbaru dinilai dengan persentase terkecil dalam hal tingkat literasi pelaku usaha terhadap Stranas PPK yakni 3.0%.

Grafik 25.
Persentase
Pelaku Usaha
yang Tahu Aksi
PPK Daerah



Kota Padang merupakan kota dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai Aksi Daerah PPK terbesar secara persentase. Di mana 48.6% pelaku usaha di Kota Padang mengaku mengetahui Aksi daerah PPK. Sedangkan Kota Pekanbaru dinilai dengan persentase terkecil dalam hal tingkat literasi pelaku usaha terhadap UU Tipikor yakni 1.0%.

4. Penutup

Persepsi secara definisi adalah kenyataan yang dipercaya (*perceived reality*) yang dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan diinterpretasi dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu. Dengan memakai kerangka pemikiran seperti ini, maka Indeks Persepsi Korupsi 2017 harus dimaknai sebagai gambaran tingkat korupsi di 12 kota di Indonesia, berdasarkan persepsi 1200 responden yang berasal dari pelaku usaha.

Nilai IPK yang berkisar antara 0 sampai dengan 100 ini lebih jauh bisa dilihat sebagai penggambaran interaksi dan tingkat perilaku suap yang terjadi di masyarakat, baik dalam pelayanan publik maupun hubungan bisnis dengan institusi publik. Gambaran tersebut kemudian dibandingkan dengan persepsi masyarakat mengenai komitmen pemerintah daerah dalam usaha pemberantasan korupsi.

Boleh dikatakan Indeks Persepsi Korupsi 2017 hendak membuktikan bahwa persepsi korupsi tidak kehilangan kemampuannya untuk mengukur korupsi secara akurat. Persepsi korupsi memiliki keepatan dengan indikator pengukuran korupsi lain baik yang berupa insiden korupsi, probabilitas korupsi, dan alokasi biaya suap. Melalui survei ini diperoleh gambaran juga bahwa korupsi tidak hanya masalah bagi kemudahan berusaha, mendistorsi daya saing lokal, menurunkan integritas publik, dan menurunkan integritas bisnis. Korupsi secara jelas dan terang mengganggu program pemerintah yang sedang gencar dengan berbagai insentif ekonomi dan investasi melalui paket kebijakan ekonomi. Selain paket kebijakan ekonomi seharusnya Pemerintah juga memberikan jaminan terhadap paket kebijakan penurunan risiko korupsi.

KESIMPULAN

Hasil survei IPK 2017 menunjukkan bahwa tingkat korupsi pada level kota mempunyai rerata 60.8. Dalam skala 0–100, skor IPK 2017 menandakan di atas rata-rata. Jika dibandingkan dengan IPK 2015, di mana rerata saat itu adalah 54.6, maka bisa dikatakan terjadi peningkatan skor yang artinya terjadi perbaikan dalam hal interaksi pelaku usaha dengan pemerintah.

Adanya tren positif dari skor IPK 2017 untuk Kota Jakarta Utara dengan skor tertinggi 73.9 menunjukkan adanya pergeseran persepsi pelaku usaha dalam menilai layanan publik terkait. Di sisi lain, IPK 2017 menunjukkan adanya beberapa kota yang masih perlu usaha keras untuk memberantas korupsi.

Dalam kaitannya antara persepsi korupsi, daya saing dan faktor penghambat kemudahan berusaha, menunjukkan korelasi positif. Di mana kota dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi maka tingkat daya saing dan kemudahan berusahnya juga relatif lebih baik. Sebaliknya, kota dengan persepsi korupsi buruk maka daya saing dan kemudahan berusahnya juga akan buruk.

Salah satu temuan yang juga perlu untuk dikemukakan adalah terkait masih banyaknya pelaku usaha yang menganggap korupsi bukanlah hal yang penting. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih dianggap sebagai bentuk permisivitas bagi sebagian kalangan pelaku usaha.

Dalam IPK 2017 ini bisa dijelaskan bahwa hampir 2 dari 10 pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk berusaha lebih keras lagi dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Terkait dengan sektor publik terdampak korupsi, persepsi publik tentang lembaga publik terkorup belum menunjukkan perubahan signifikan. Kementerian yang strategis, dinas-dinas yang berada di kota-kota, kepolisian, dan peradilan masih dipersepsikan korup oleh responden. Hal ini diperkuat dengan probabilitas penyuapan terhadap instansi tersebut masih tinggi dalam satu tahun terakhir.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan dalam survei ini, TI-Indonesia menyarankan agar para pihak, baik pelaku usaha dan pemerintah sebagai penyedia layanan publik sudah selayaknya mempunyai pemahaman yang sama akan bahaya korupsi dan besar kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

Oleh karena itu, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam upaya melawan korupsi di Indonesia dengan cara:

Pertama, Pemerintah perlu mempertegas kebijakan antikorupsi sebagai faktor prasyarat yang mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya Pemerintah kota bisa berbenah dan menggunakan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemberantasan korupsi pada skala lokal. Sejalan dengan hal tersebut Institusi publik seperti Kementerian dan Dinas, aparat penegak hukum dan juga Dewan Perwakilan Rakyat pada semua jenjang juga berbenah diri memperbaiki sistemnya untuk mengurangi kecenderungan terjadi korupsi.

Kedua, pelaku usaha seharusnya memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaannya agar terhindar dari risiko korupsi dan juga kehilangan reputasi baiknya. Ketiga, masyarakat sipil perlu melakukan pemantauan terhadap program antikorupsi antara pemerintah dan swasta sebagai dasar penilaian akuntabilitas publik secara aktif dan konstruktif.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017

SKOR IPK PER KOTA DAN RERATA 12 KOTA

Indeks Persepsi Korupsi 2017 dihitung dari rerata persepsi pelaku usaha mengenai 5 komponen, yaitu:

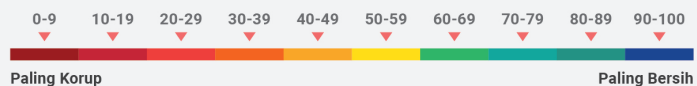
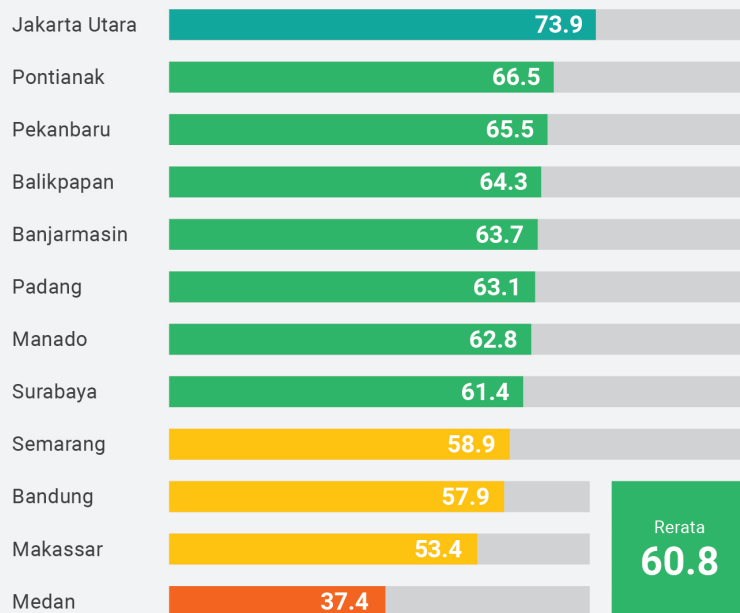
Prevalensi Korupsi

Akuntabilitas Publik

Motivasi Korupsi

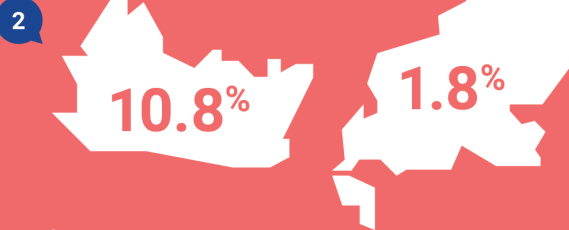
Dampak Korupsi

Efektivitas Pemberantasan Korupsi



HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI 2017

1 **17%** Pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing **memberikan suap**.



Kota dengan **persentase suap** tertinggi adalah **Bandung** sebesar 10.8% dari total biaya produksi. Sementara itu, kota dengan persentase biaya suap terendah adalah **Makassar** sebesar 1.8% dari total biaya produksi.

3

Instansi paling terdampak korupsi.

Legislatif Peradilan Kepolisian

4

Sektor paling terdampak korupsi.

Perizinan Pengadaan Penerbitan Kuota Perdagangan

5

Sektor lapangan usaha yang dinilai paling rendah **potensi suapnya**.

Air Minum Perbankan Kelistrikan



Lembaga Antikorupsi dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan **Partai Politik** dianggap mempunyai kemampuan, peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi yang rendah.

7

Penghambat pemberantasan korupsi terbesar adalah karena **korupsi bukan dianggap sebagai masalah penting** (skor 61.5 dari 100).

8

3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah.

9

5 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor.

10

Biro jasa adalah pihak ketiga yang paling sering digunakan oleh pelaku usaha dalam berinteraksi dengan layanan publik.

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

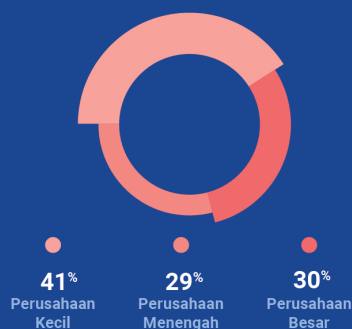
Total Responden

1200 pelaku usaha
Tersebar di 12 kota

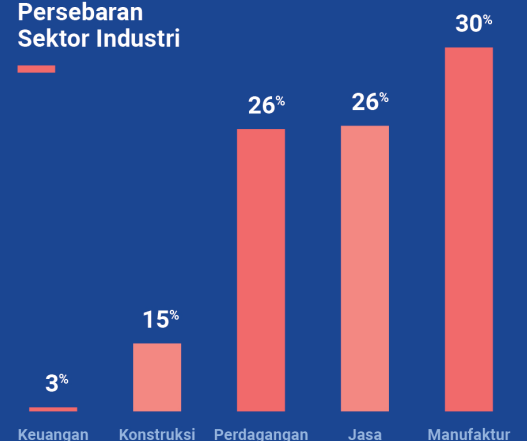
**Waktu
Pengambilan Data**

Juni – Agustus 2017

Persebaran Skala Perusahaan



Persebaran Sektor Industri



HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA JAKARTA UTARA

Skor IPK
73.9

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
75.1



Akuntabilitas
74.4



Motivasi
72.4



Sektor Terdampak
75.3



Instansi Terdampak
73.2



Efektivitas
71.0

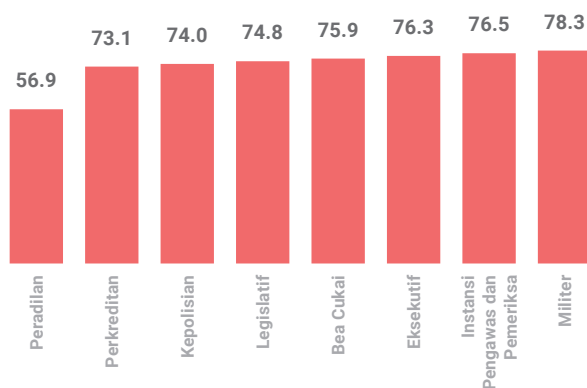
Indeks Daya Saing Lokal

71.3

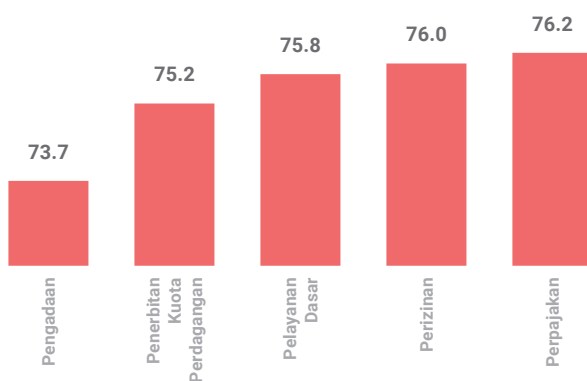
Indeks Kemudahan Berusaha

67.4

- 10% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Jakarta Utara sebesar 8.2% dari total biaya produksi
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Pertanian
3.0



Kehutanan
3.1



Pertambangan
3.1



Perumahan
3.2



Perkebunan
3.4



Migas
3.4



Konstruksi
3.4



Jasa-jasa
3.4



Transportasi
3.4



Perikanan
3.4



Industri
3.5



Perdagangan
3.6



Hotel/Resto
3.6



Telekomunikasi
3.6



Kelistrikan
3.6



Air Minum
3.7



Farmasi
3.8



Perbankan
3.9

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

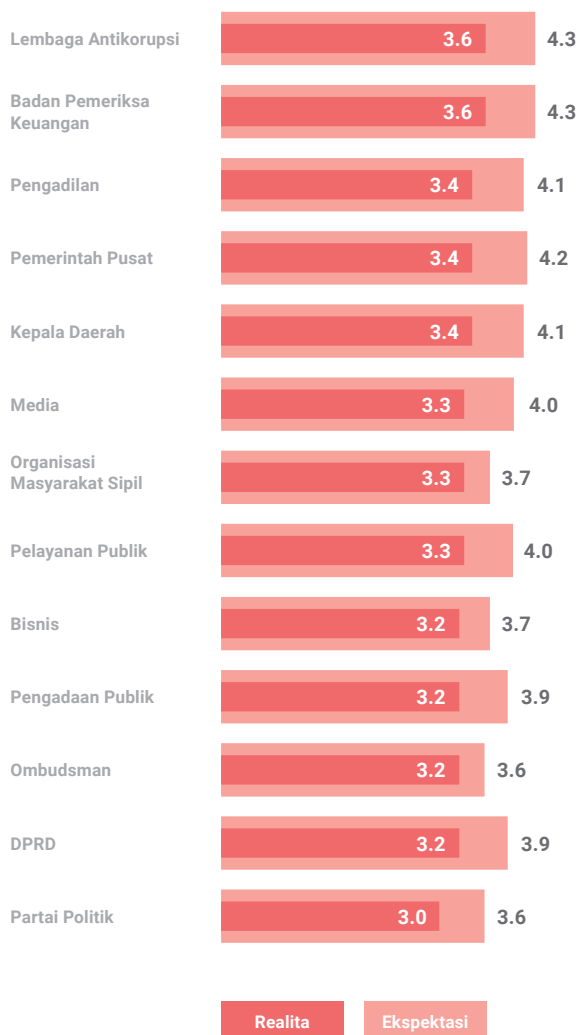
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Jakarta Utara

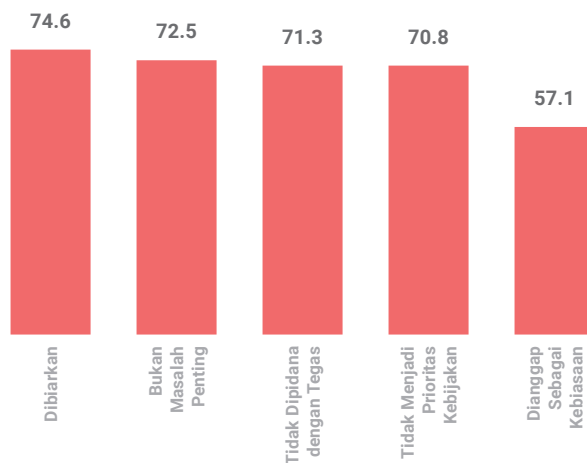
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Tata Ruang & Bangunan	14	3	21%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	28	4	14%
Dinas Perhubungan	30	4	13%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	73	6	8%
Dinas Pekerjaan Umum	28	2	7%
Dinas Perdagangan	69	4	6%
Dinas Ketenagakerjaan	38	2	5%
Dinas Pendapatan Daerah	21	1	5%
Dinas Perindustrian	45	2	4%
Kepolisian	56	2	4%
Dinas Pertambangan & Energi	7	0	0%
Dinas Koperasi dan UKM	6	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak ada waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 8 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 104 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 53% Menengah 26% Kecil 21%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 36% Jasa 29% Keuangan 0%
Perdagangan 30% Konstruksi 6%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA PONTIANAK

Skor IPK
66.5

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
65.7



Akuntabilitas
64.4



Motivasi
64.5



Sektor Terdampak
69.2



Instansi Terdampak
67.8



Efektivitas
67.4

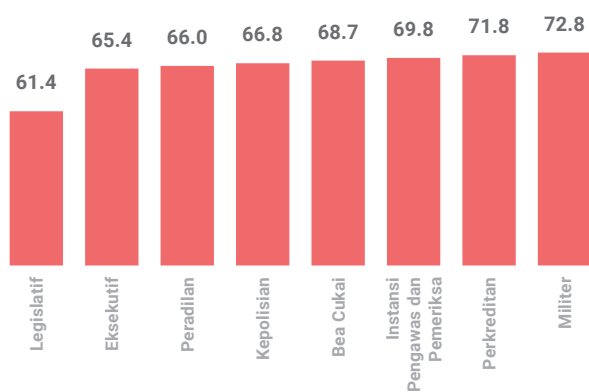
Indeks Daya Saing Lokal

70.1

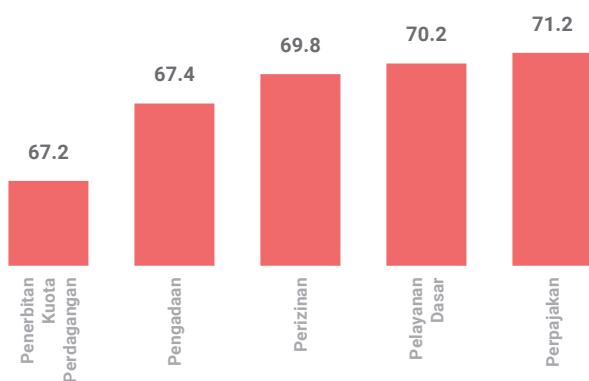
Indeks Kemudahan Berusaha

64.1

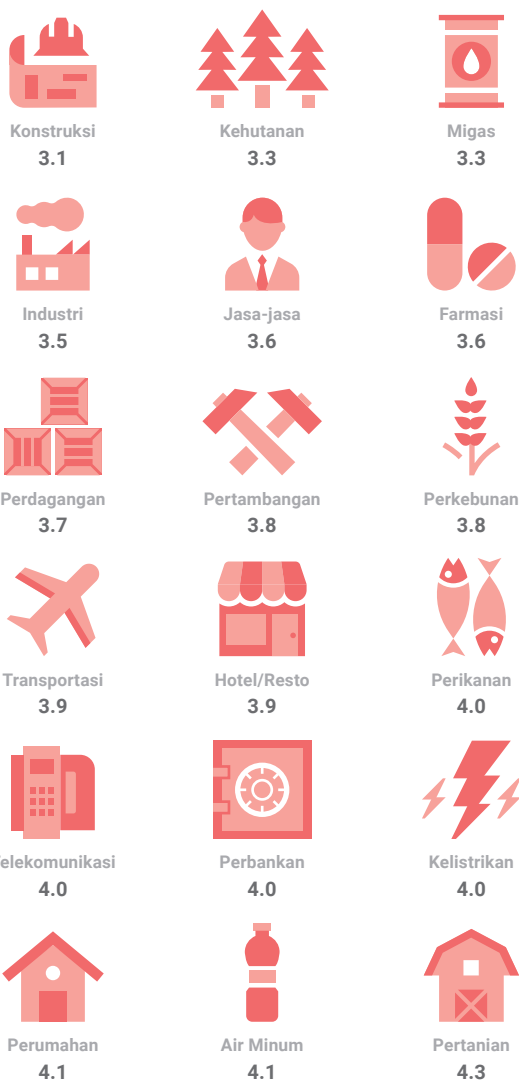
- 1 27% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- 2 Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Pontianak sebesar 3% dari total biaya produksi.
- 3 Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

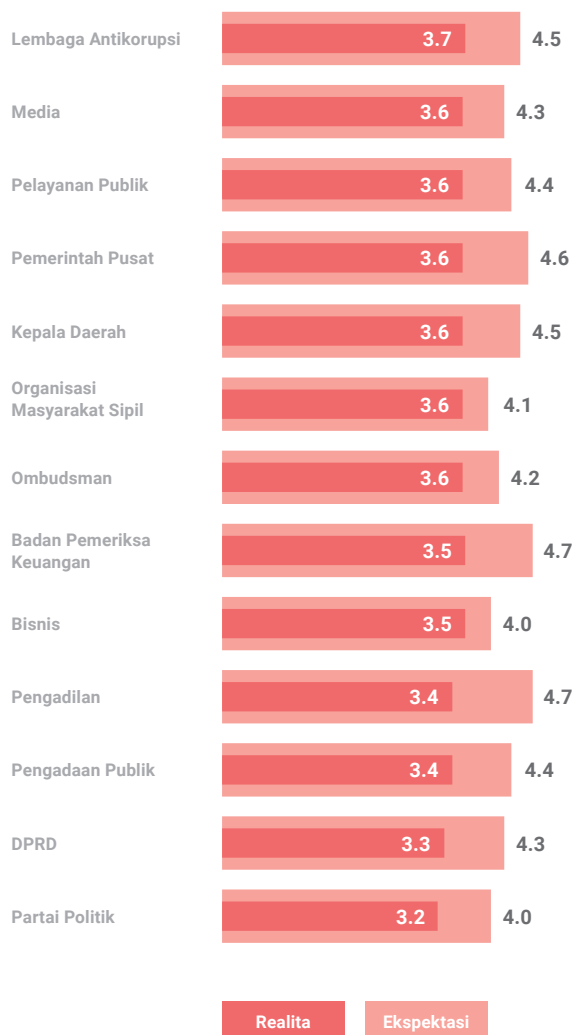
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Pontianak

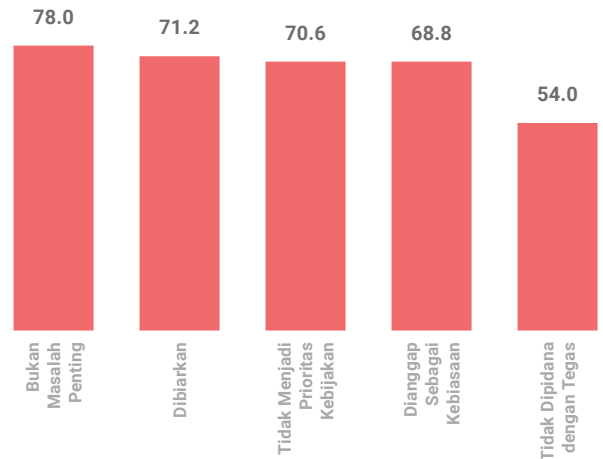
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Badan Penanaman Modal dan Promosi	25	2	8%
Dinas Pendapatan Daerah	30	2	7%
Dinas Perdagangan	49	3	6%
Kepolisian	44	2	5%
Dinas Perindustrian	29	1	3%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	61	2	3%
Dinas Ketenagakerjaan	32	1	3%
Dinas Koperasi dan UKM	14	0	0%
Dinas Pekerjaan Umum	20	0	0%
Dinas Perhubungan	12	0	0%
Dinas Pertambangan & Energi	7	0	0%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	13	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak ada waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 4 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 100 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 29% Menengah 34% Kecil 37%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 21% Jasa 29% Keuangan 3%
Perdagangan 40% Konstruksi 7%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA PEKANBARU

Skor IPK
65.5

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
65.6



Akuntabilitas
65.2



Motivasi
64.8



Sektor Terdampak
63.9



Instansi Terdampak
65.9



Efektivitas
70.6

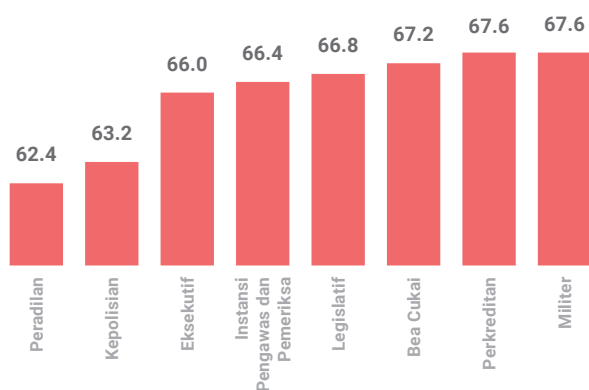
Indeks Daya Saing Lokal

65.2

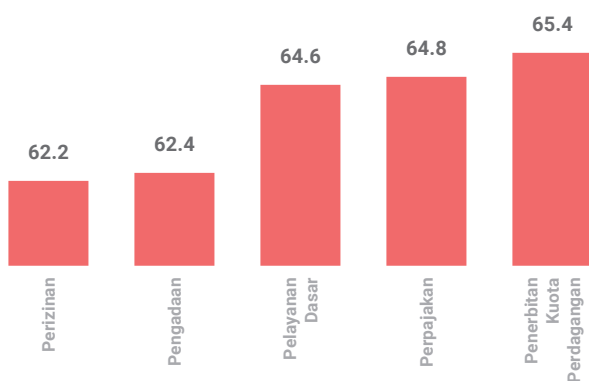
Indeks Kemudahan Berusaha

63.5

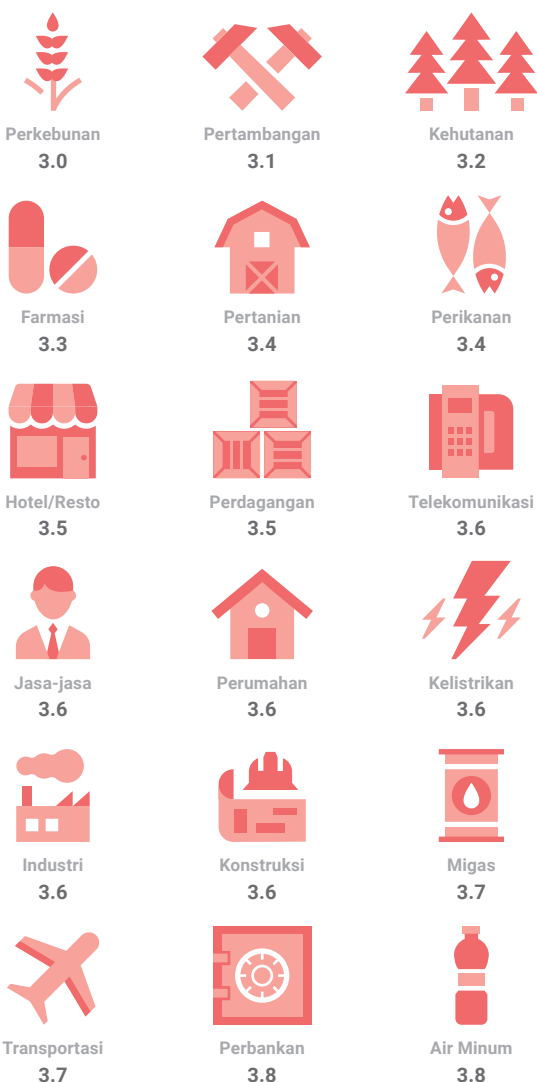
- 1 **22%** pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- 2 **Total persentase suap** yang dikeluarkan pelaku usaha di Pekanbaru sebesar **3.1%** dari total biaya produksi.
- 3 **Instansi terdampak korupsi**



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

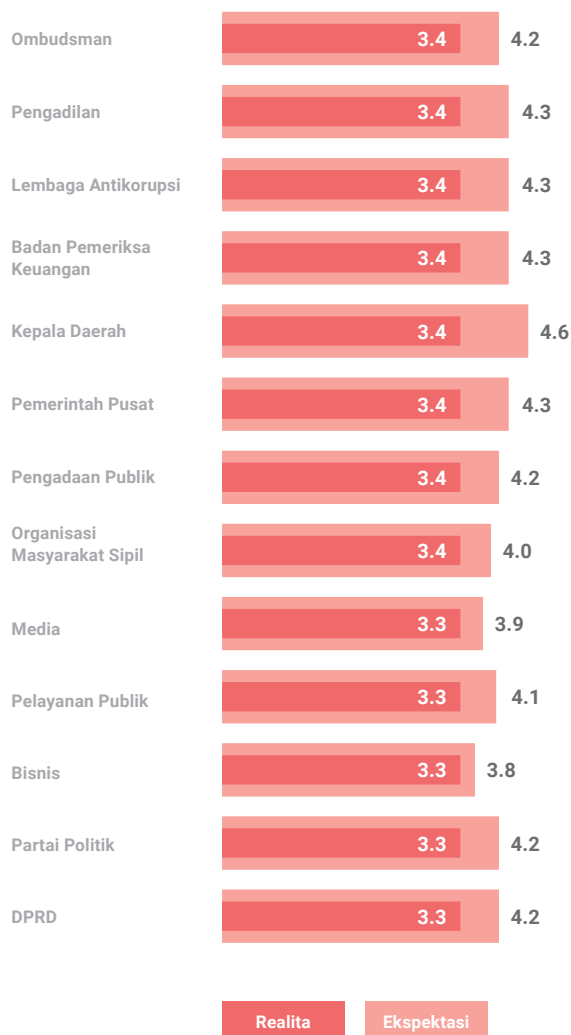
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Pekanbaru

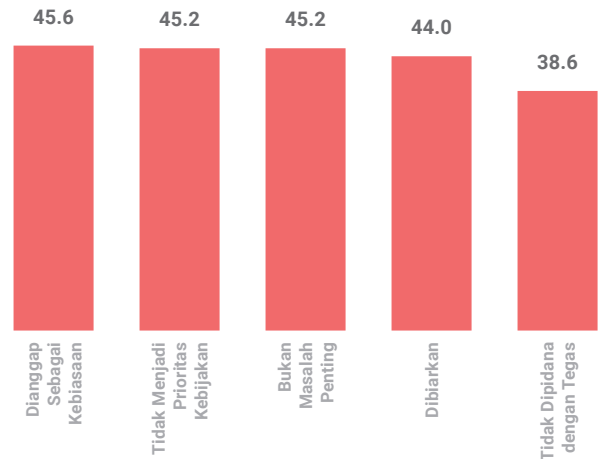
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Badan Penanaman Modal dan Promosi	20	7	35%
Dinas Pendapatan Daerah	19	6	32%
Dinas Perhubungan	10	3	30%
Dinas Perindustrian	10	3	30%
Dinas Pertambangan & Energi	7	2	29%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	22	6	27%
Dinas Ketenagakerjaan	12	3	25%
Dinas Pekerjaan Umum	20	5	25%
Dinas Perdagangan	20	5	25%
Dinas Koperasi dan UKM	23	5	22%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	66	14	21%
Kepolisian	20	4	20%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak ada waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 4 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 0 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 100 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 30% Menengah 48% Kecil 22%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 47% Jasa 8% Keuangan 1%
Perdagangan 11% Konstruksi 33%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA BALIKPAPAN

Skor IPK
64.3

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
61.5



Akuntabilitas
61.8



Motivasi
56.8



Sektor Terdampak
63.9



Instansi Terdampak
70.1



Efektivitas
77.1

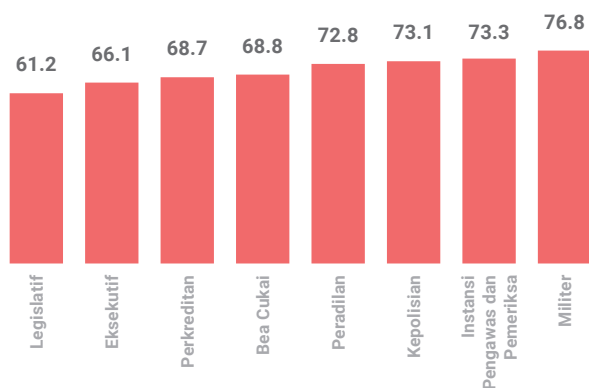
Indeks Daya Saing Lokal

66.7

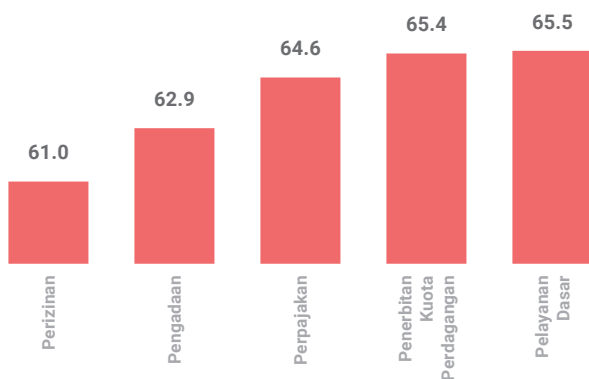
Indeks Kemudahan Berusaha

59.5

- 21% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Balikpapan sebesar 8.6% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Perikanan
2.8



Kehutanan
2.9



Perkebunan
2.9



Migas
3.0



Hotel/Resto
3.0



Pertambangan
3.1



Pertanian
3.1



Industri
3.2



Perumahan
3.2



Farmasi
3.3



Konstruksi
3.4



Transportasi
3.6



Perbankan
3.7



Telekomunikasi
3.7



Perdagangan
3.9



Jasa-jasa
3.9



Kelistrikan
4.0



Air Minum
4.2

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Balikpapan

	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan & Energi	20	15	75%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	22	15	68%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	18	12	67%
Dinas Perindustrian	16	10	63%
Dinas Perhubungan	20	11	55%
Dinas Koperasi dan UKM	19	10	53%
Dinas Pendapatan Daerah	29	15	52%
Kepolisian	35	18	51%
Dinas Pekerjaan Umum	30	14	47%
Dinas Perdagangan	33	10	30%
Dinas Ketenagakerjaan	48	10	21%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	64	11	17%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan pihak ketiga, pelaku usaha paling sering menggunakan keluarga, dengan alasan tidak buang-buang waktu.

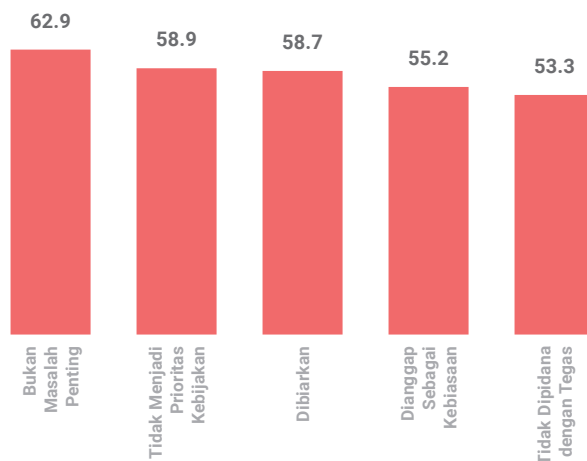
7 Pilar Sistem Integritas Lokal

Badan Pemeriksa Keuangan	3.8	4.3
Lembaga Antikorupsi	3.8	4.4
Media	3.8	4.2
Pengadilan	3.7	4.2
Ombudsman	3.6	4.1
Pelayanan Publik	3.6	4.2
Bisnis	3.5	4.0
Organisasi Masyarakat Sipil	3.5	4.2
Pengadaan Publik	3.5	4.1
Kepala Daerah	3.4	4.1
Partai Politik	3.4	4.1
DPRD	3.4	4.3
Pemerintah Pusat	3.3	4.2

Realita

Ekspektasi

8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 6 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 4 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 105 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 40% Menengah 33% Kecil 27%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 3% Jasa 43% Keuangan 5%
Perdagangan 32% Konstruksi 17%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA BANJARMASIN

Skor IPK
63.7

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
61.6



Akuntabilitas
64.6



Motivasi
63.6



Sektor Terdampak
64.3



Instansi Terdampak
64.1



Efektivitas
66.7

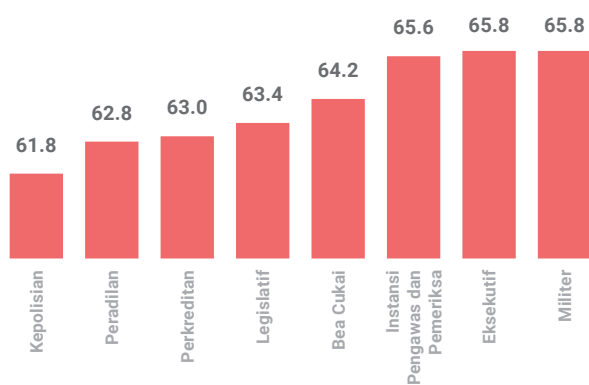
Indeks Daya Saing Lokal

72.6

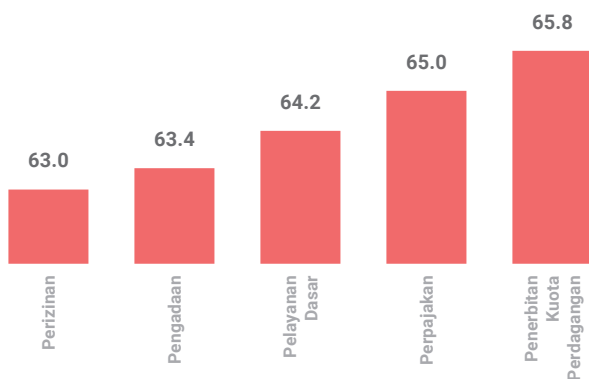
Indeks Kemudahan Berusaha

68.1

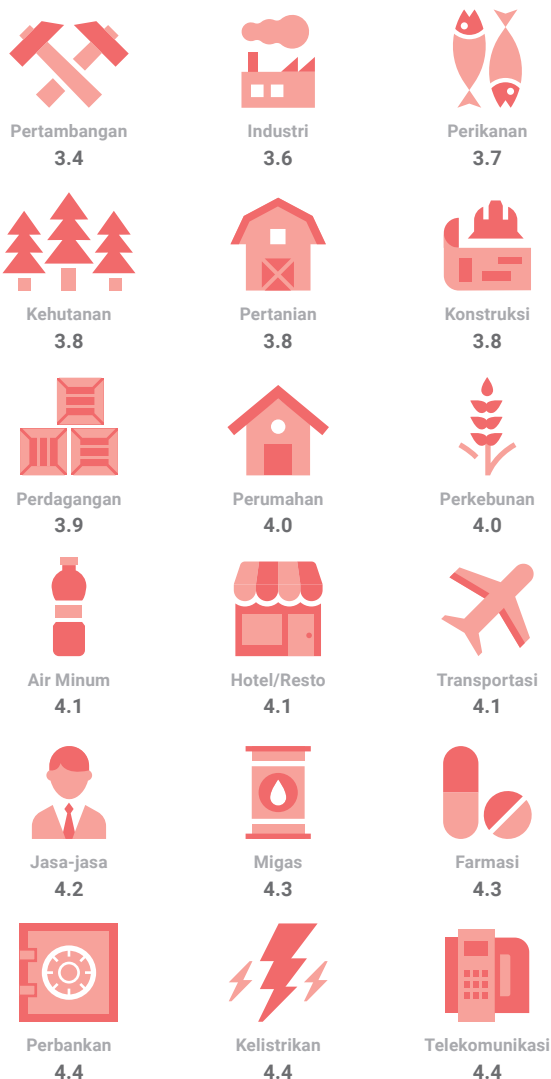
- 13% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Banjarmasin sebesar 6.6% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

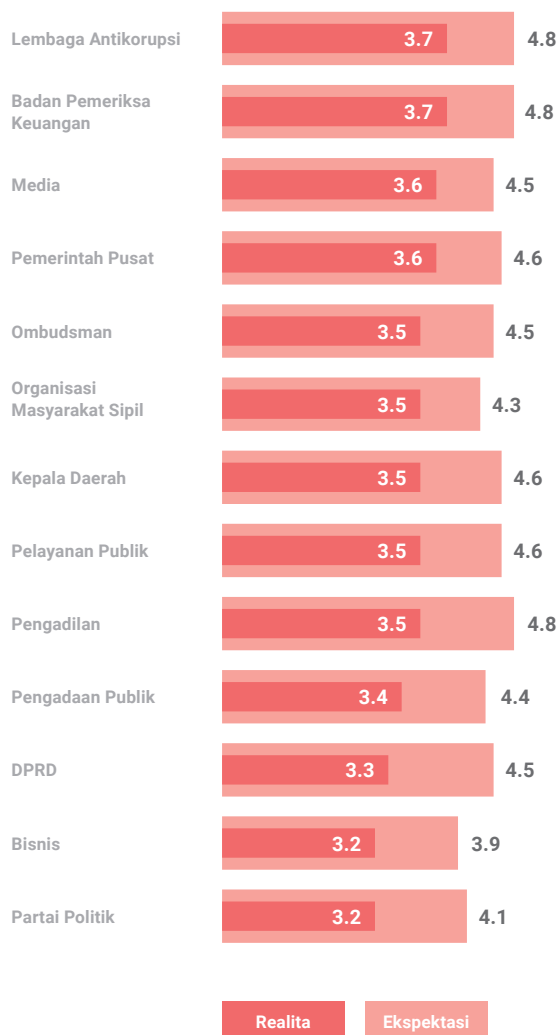
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Banjarmasin

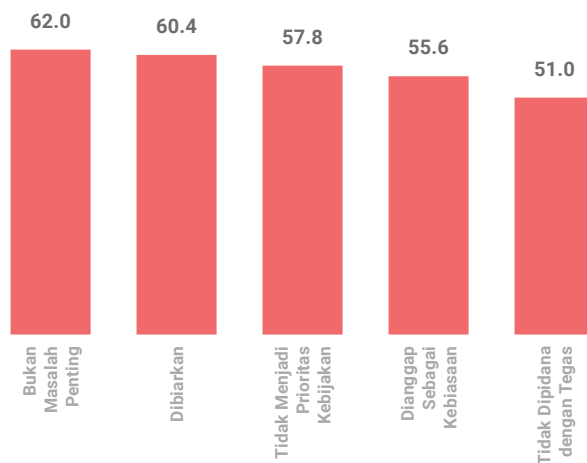
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Perhubungan	15	5	33%
Dinas Pekerjaan Umum	20	5	25%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	24	4	17%
Dinas Perindustrian	14	2	14%
Kepolisian	21	3	14%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	49	6	12%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	18	2	11%
Dinas Ketenagakerjaan	37	4	11%
Dinas Perdagangan	28	3	11%
Dinas Pendapatan Daerah	25	2	8%
Dinas Koperasi dan UKM	18	1	6%
Dinas Pertambangan & Energi	3	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **anak perusahaan**, dengan alasan **tidak ada waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 7 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 6 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 100 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 25% Menengah 49% Kecil 26%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 16% Jasa 43% Keuangan 9%
Perdagangan 17% Konstruksi 15%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA PADANG

Skor IPK
63.1

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
60



Akuntabilitas
64.9



Motivasi
59.9



Sektor Terdampak
67.5



Instansi Terdampak
62.7



Efektivitas
68.5

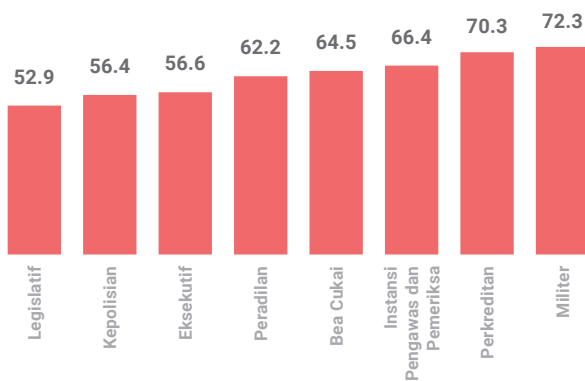
Indeks Daya Saing Lokal

68.9

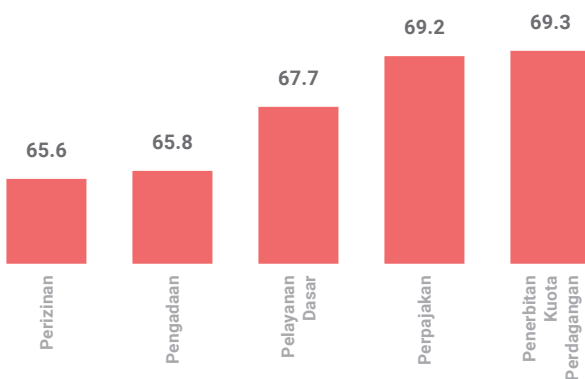
Indeks Kemudahan Berusaha

65.2

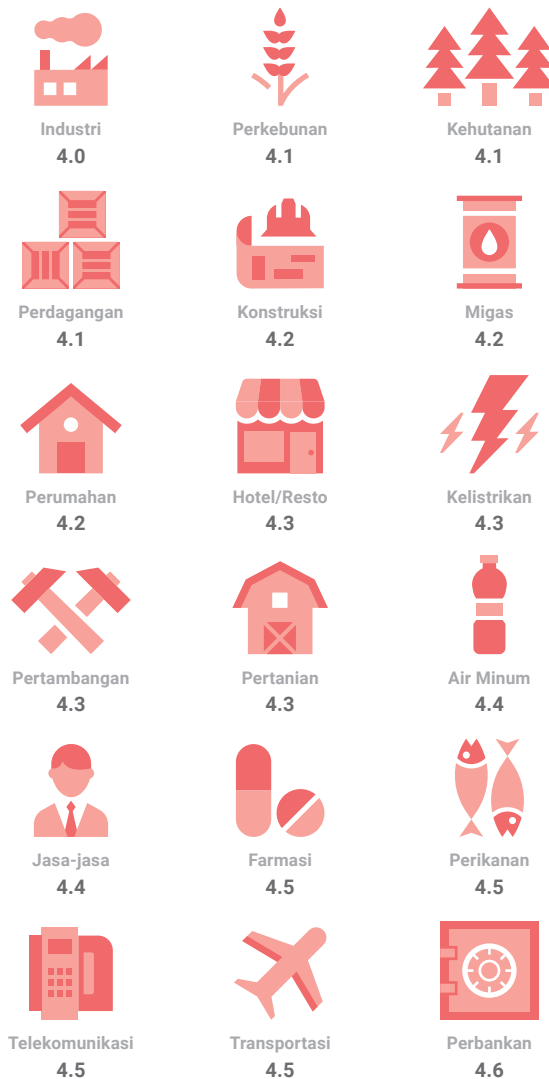
- 15% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Padang sebesar 2% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

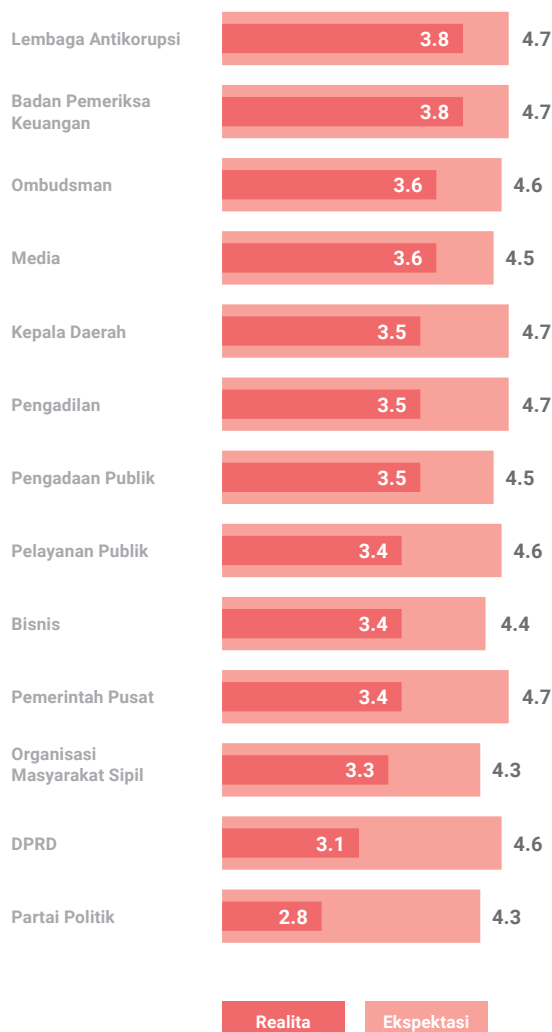
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Padang

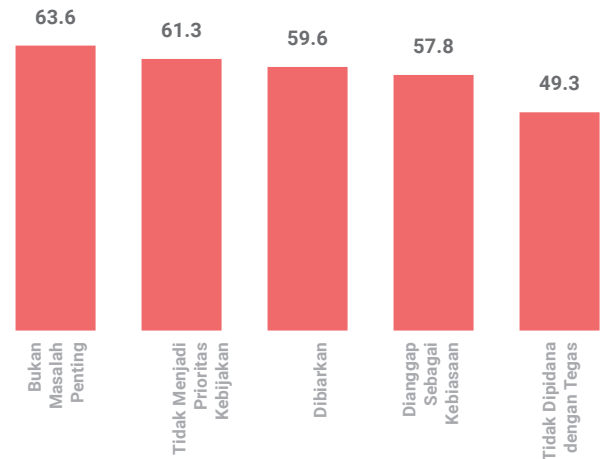
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan & Energi	9	1	11%
Dinas Perhubungan	12	1	8%
Dinas Perindustrian	34	2	6%
Dinas Pekerjaan Umum	20	1	5%
Dinas Pendapatan Daerah	25	1	4%
Kepolisian	26	1	4%
Dinas Ketenagakerjaan	30	1	3%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	52	1	2%
Dinas Perdagangan	54	1	2%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	22	0	0%
Dinas Koperasi dan UKM	20	0	0%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	19	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **keluarga**, dengan alasan **tidak tahu prosedur**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 5 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 4 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 107 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 17% Menengah 9% Kecil 74%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 51% Jasa 9% Keuangan 6%
Perdagangan 21% Konstruksi 12%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA MANADO

Skor IPK
62.8

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
57.8



Akuntabilitas
64.6



Motivasi
55.7



Sektor Terdampak
70.8



Instansi Terdampak
65.1



Efektivitas
65

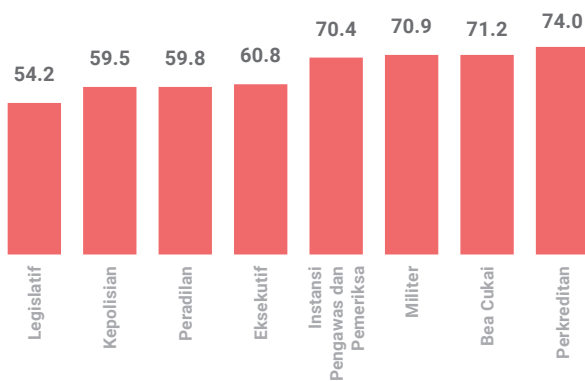
Indeks Daya Saing Lokal

71.0

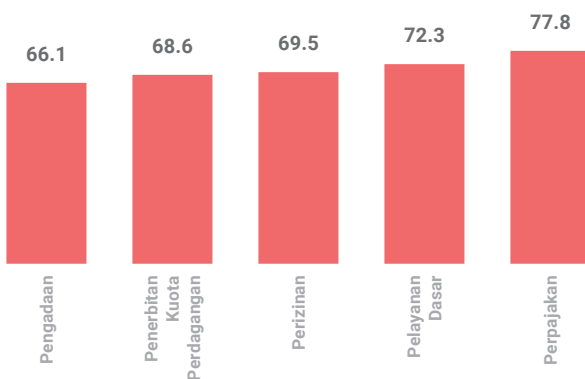
Indeks Kemudahan Berusaha

66.0

- 15% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Manado sebesar 9.2% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Pertambangan
3.6



Migas
3.9



Perikanan
3.9



Kehutanan
3.9



Jasa-jasa
3.9



Pertanian
3.9



Konstruksi
4.0



Perkebunan
4.0



Air Minum
4.0



Farmasi
4.1



Industri
4.2



Perumahan
4.2



Transportasi
4.2



Kelistrikan
4.2



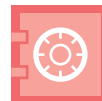
Hotel/Resto
4.3



Perdagangan
4.3



Telekomunikasi
4.5



Perbankan
4.8

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

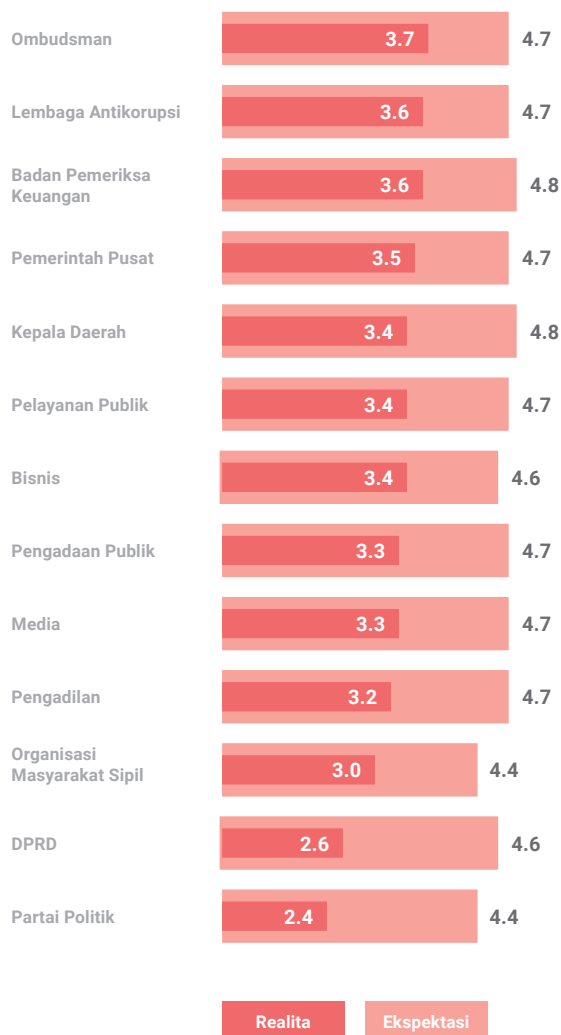
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Manado

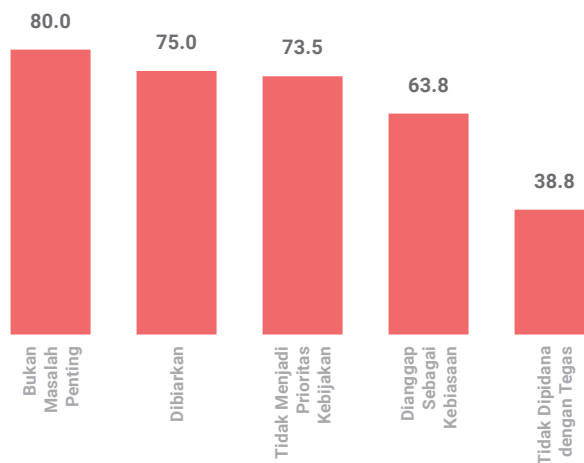
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Badan Penanaman Modal dan Promosi	6	2	33
Dinas Perhubungan	13	4	31
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	72	18	25
Dinas Tata Ruang & Bangunan	20	4	20
Dinas Pendapatan Daerah	54	10	19
Dinas Koperasi dan UKM	17	3	18
Kepolisian	30	4	13
Dinas Ketenagakerjaan	50	5	10
Dinas Pekerjaan Umum	11	1	9
Dinas Perdagangan	22	2	9
Dinas Perindustrian	14	1	7
Dinas Pertambangan & Energi	1	0	0

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak buang-buang waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 8 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 5 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 80 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 39% Menengah 20% Kecil 41%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 5% Jasa 45% Keuangan 8%
Perdagangan 29% Konstruksi 14%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA SURABAYA

Skor IPK

61.4

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
61.1



Akuntabilitas
63.8



Motivasi
54.8



Sektor Terdampak
66.0



Instansi Terdampak
60.6



Efektivitas
64.4

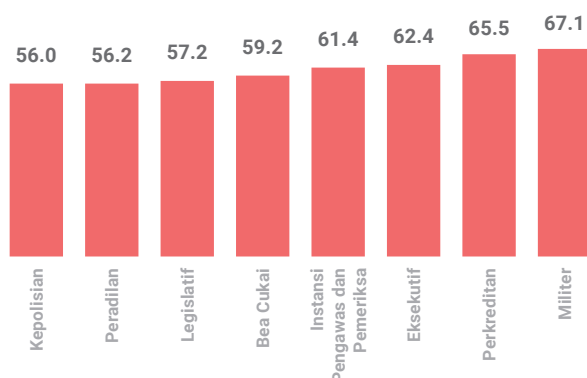
Indeks Daya Saing Lokal

72.6

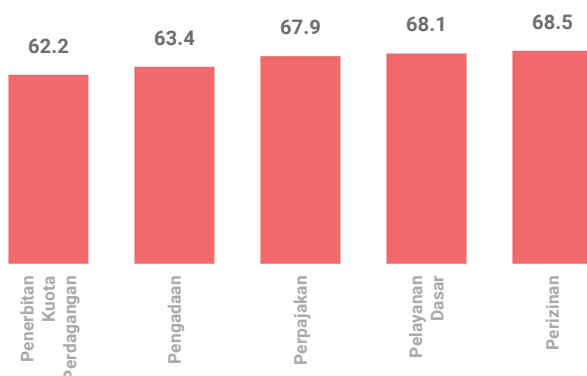
Indeks Kemudahan Berusaha

66.8

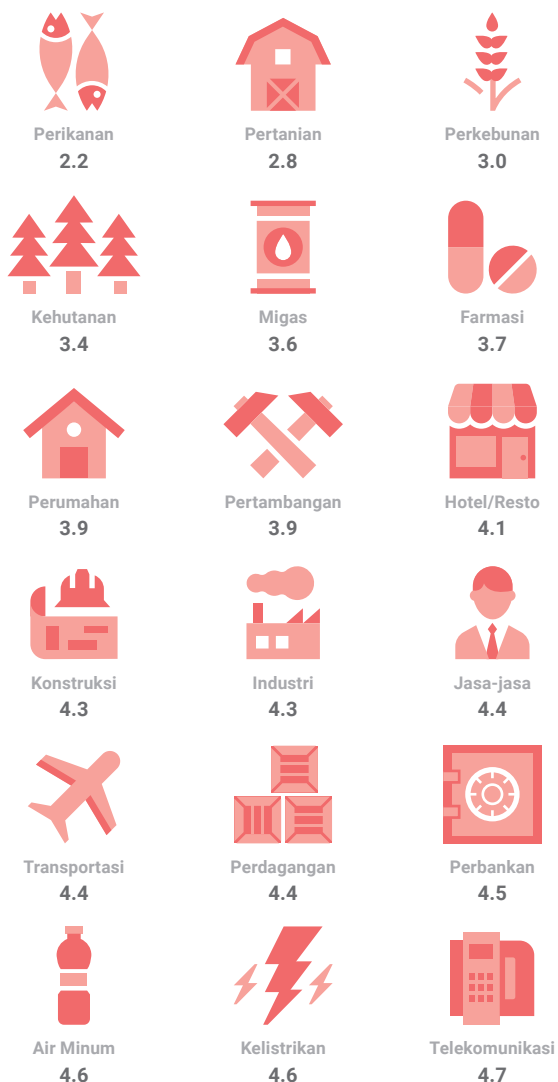
- 19% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Surabaya sebesar 2.7% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

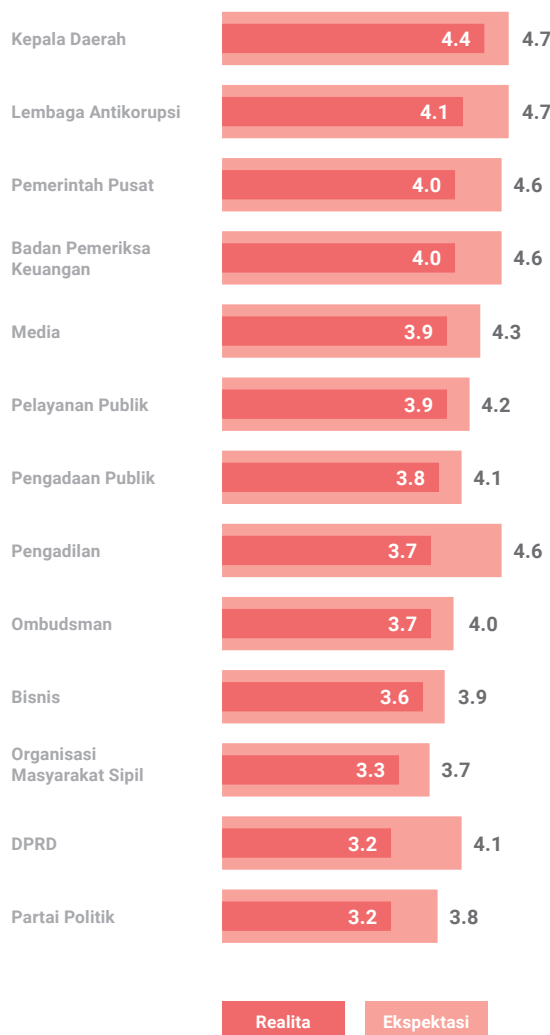
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Surabaya

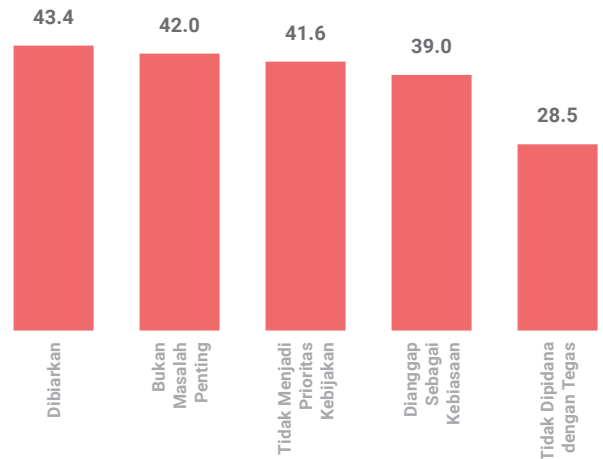
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pendapatan Daerah	24	1	4%
Dinas Perdagangan	64	2	3%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	63	1	2%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	10	0	0%
Dinas Ketenagakerjaan	40	0	0%
Dinas Koperasi dan UKM	3	0	0%
Dinas Pekerjaan Umum	34	0	0%
Dinas Perhubungan	9	0	0%
Dinas Perindustrian	33	0	0%
Dinas Pertambangan & Energi	2	0	0%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	20	0	0%
Kepolisian	5	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **calo**, dengan alasan **takut dipersulit**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 6 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 101 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 13% Menengah 28% Kecil 59%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 25% Jasa 17% Keuangan 1%
Perdagangan 18% Konstruksi 40%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA SEMARANG

Skor IPK

58.9

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
58.8



Akuntabilitas
58.4



Motivasi
56.8



Sektor Terdampak
59.5



Instansi Terdampak
59.3



Efektivitas
62.9

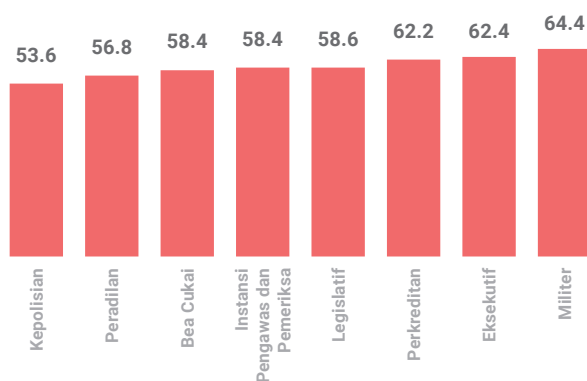
Indeks Daya Saing Lokal

67.6

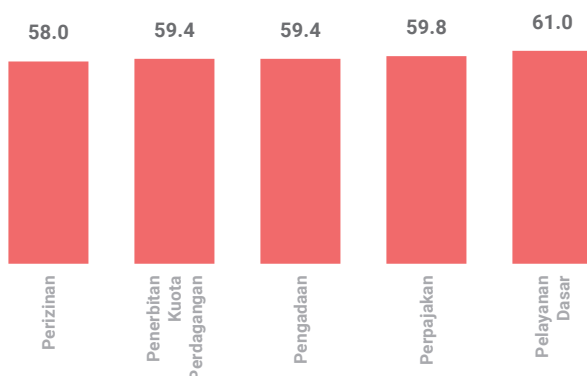
Indeks Kemudahan Berusaha

65.7

- 1 25% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- 2 Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Semarang sebesar 4.4% dari total biaya produksi.
- 3 Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Kehutanan
3.2



Perkebunan
3.5



Migas
3.5



Telekomunikasi
3.5



Jasa-jasa
3.6



Perikanan
3.6



Perdagangan
3.6



Pertanian
3.6



Hotel/Resto
3.6



Industri
3.7



Konstruksi
3.8



Perbankan
3.8



Kelistrikan
3.9



Air Minum
3.9



Farmasi
3.9



Transportasi
3.9



Pertambangan
4.1



Perumahan
4.1

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

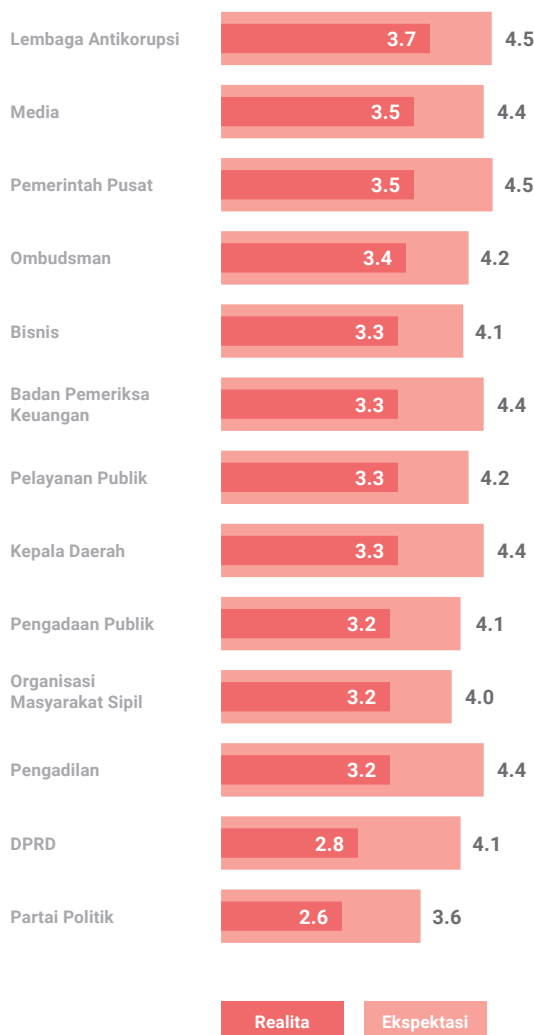
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Semarang

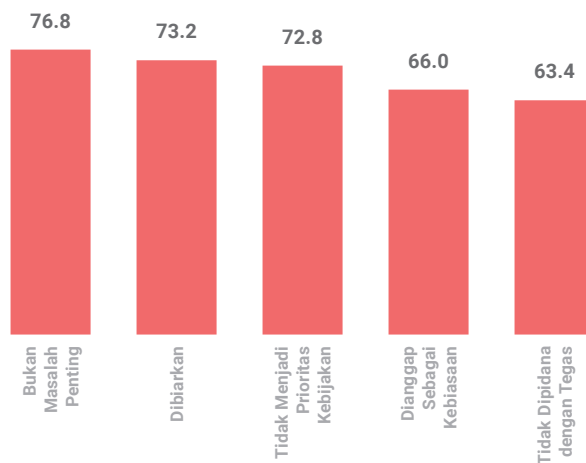
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Tata Ruang & Bangunan	21	5	24%
Kepolisian	69	7	10%
Dinas Pekerjaan Umum	21	2	10%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80	6	8%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	28	2	7%
Dinas Perdagangan	71	3	4%
Dinas Ketenagakerjaan	49	2	4%
Dinas Pendapatan Daerah	38	1	3%
Dinas Koperasi dan UKM	49	1	2%
Dinas Perindustrian	56	1	2%
Dinas Perhubungan	21	0	0%
Dinas Pertambangan & Energi	6	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak buang-buang waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 6 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 4 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 100 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 42% Menengah 38% Kecil 20%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 19% Jasa 44% Keuangan 2%
Perdagangan 28% Konstruksi 7%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA BANDUNG

Skor IPK

57.9

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
60.7



Akuntabilitas
56.4



Motivasi
55.7



Sektor Terdampak
59.6



Instansi Terdampak
54.6



Efektivitas
67.1

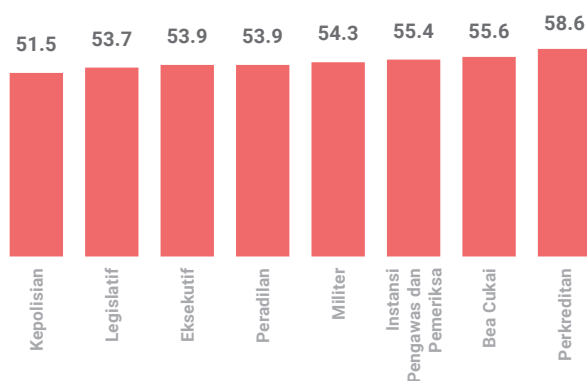
Indeks Daya Saing Lokal

63.3

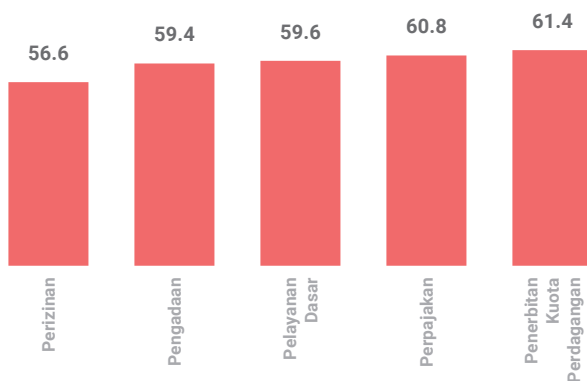
Indeks Kemudahan Berusaha

54.2

- 1 23% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- 2 Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Bandung sebesar 10.8% dari total biaya produksi.
- 3 Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Konstruksi
2.7



Jasa-jasa
2.9



Perumahan
3.0



Perdagangan
3.2



Transportasi
3.2



Hotel/Resto
3.2



Industri
3.3



Pertanian
3.3



Telekomunikasi
3.3



Farmasi
3.4



Perbankan
3.5



Kelistrikan
3.5



Air Minum
3.6



Perkebunan
3.8



Kehutanan
4.0



Migas
4.8



Pertambangan
4.8

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

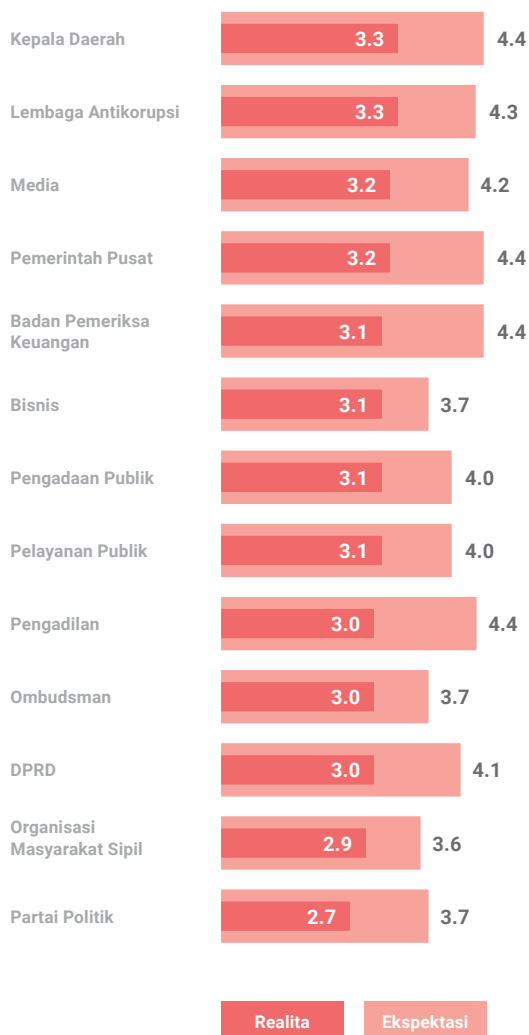
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Bandung

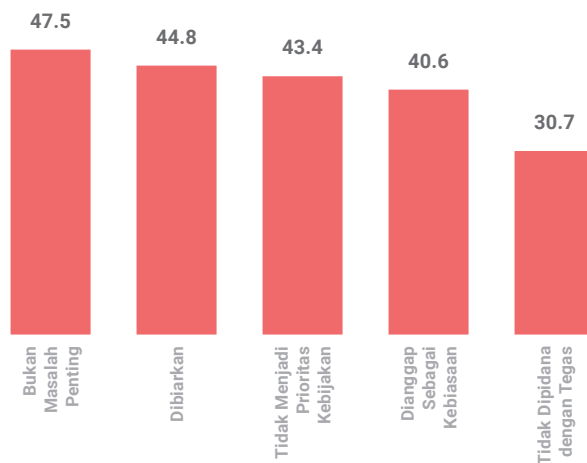
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan & Energi	1	1	100%
Dinas Perdagangan	42	10	24%
Kepolisian	17	4	24%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	41	9	22%
Dinas Pekerjaan Umum	6	1	17%
Dinas Ketenagakerjaan	13	2	15%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	7	1	14%
Dinas Perindustrian	10	1	10%
Dinas Pendapatan Daerah	20	1	5%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	16	0	0%
Dinas Koperasi dan UKM	8	0	0%
Dinas Perhubungan	3	0	0%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **biro jasa**, dengan alasan **tidak buang-buang waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 4 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 2 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 101 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 9% Menengah 7% Kecil 84%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 44% Jasa 6% Keuangan 0%
Perdagangan 48% Konstruksi 3%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA MAKASSAR

Skor IPK

53.4

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
51.4



Akuntabilitas
54.4



Motivasi
45.9



Sektor Terdampak
57.0



Instansi Terdampak
54.8



Efektivitas
62.4

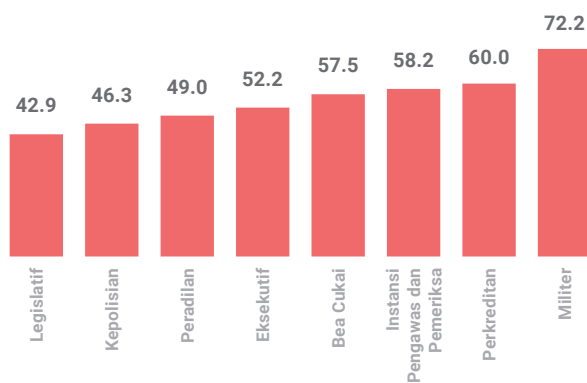
Indeks Daya Saing Lokal

67.2

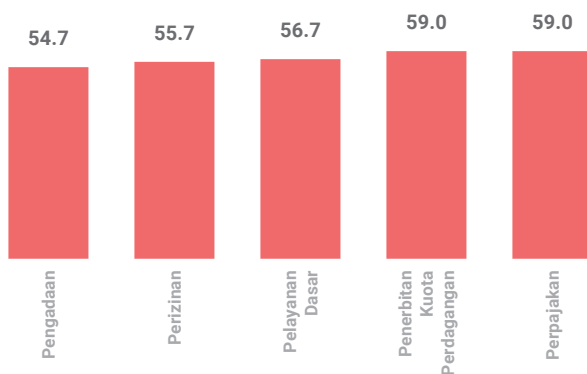
Indeks Kemudahan Berusaha

59.8

- 1 9% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- 2 Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.
- 3 Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Pertambangan
3.4



Konstruksi
3.5



Industri
3.7



Perumahan
3.7



Migas
3.8



Kehutanan
3.8



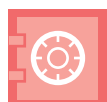
Perdagangan
3.9



Perikanan
4.0



Hotel/Resto
4.0



Perbankan
4.0



Perkebunan
4.0



Pertanian
4.0



Jasa-jasa
4.1



Farmasi
4.1



Transportasi
4.1



Kelistrikan
4.1



Telekomunikasi
4.2



Air Minum
4.4

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

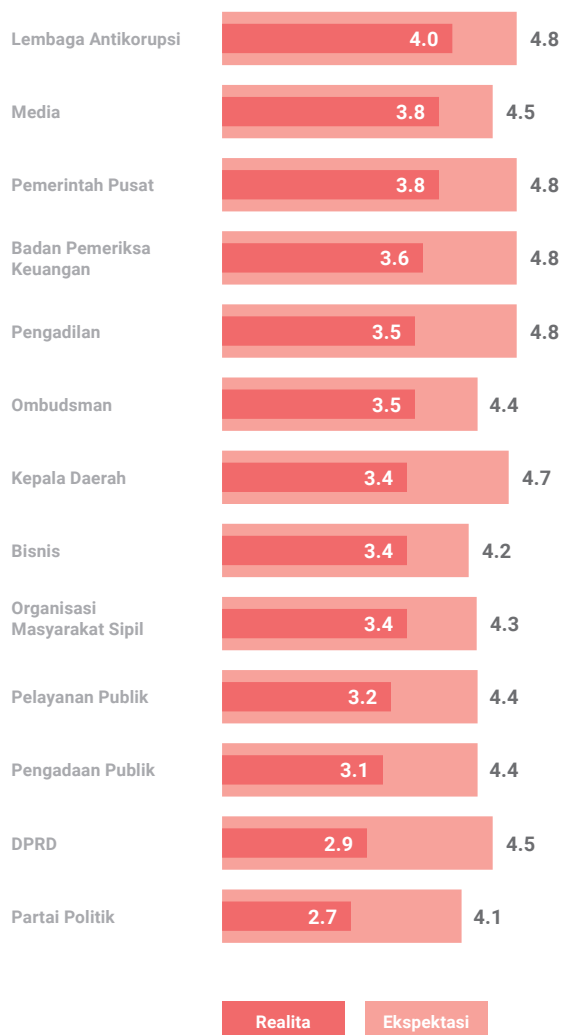
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Makassar

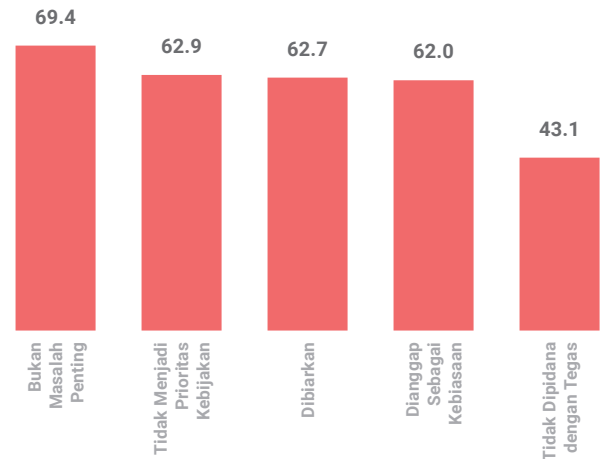
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan & Energi	3	1	33%
Kepolisian	30	10	33%
Dinas Perhubungan	20	6	30%
Dinas Koperasi dan UKM	8	2	25%
Dinas Pekerjaan Umum	8	2	25%
Dinas Pendapatan Daerah	37	9	24%
Dinas Perdagangan	43	8	19%
Dinas Perindustrian	25	4	16%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	44	7	16%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	24	3	13%
Dinas Ketenagakerjaan	33	4	12%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	17	2	12%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **calo**, dengan alasan **tidak buang-buang waktu**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 6 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 4 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI

Total responden: 102 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 32% Menengah 19% Kecil 49%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 40% Jasa 16% Keuangan 2%
Perdagangan 28% Konstruksi 14%

HASIL SURVEI PERSEPSI 2017 KOTA MEDAN

Skor IPK

37.4

KOMPONEN PENYUSUN



Prevalensi
32.6



Akuntabilitas
37.7



Motivasi
35.1



Sektor Terdampak
41.2



Instansi Terdampak
39.6



Efektivitas
40.8

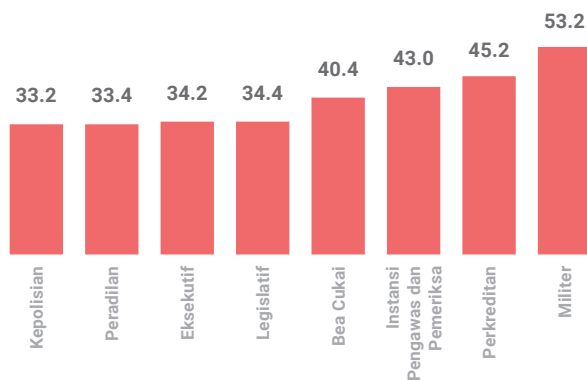
Indeks Daya Saing Lokal

50.1

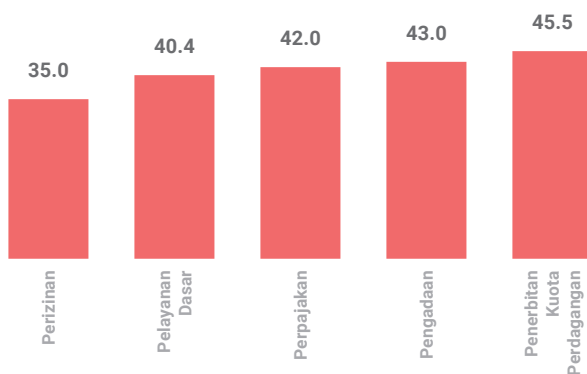
Indeks Kemudahan Berusaha

41.1

- 14% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap
- Total persentase suap yang dikeluarkan pelaku usaha di Medan sebesar 2.9% dari total biaya produksi.
- Instansi terdampak korupsi



4 Sektor terdampak korupsi



5 Persepsi suap pada sektor lapangan usaha



Pertambangan
2.8



Kehutanan
2.9



Pertanian
3.0



Transportasi
3.1



Konstruksi
3.1



Jasa-jasa
3.1



Migas
3.1



Perbankan
3.1



Perkebunan
3.2



Perdagangan
3.2



Industri
3.4



Perumahan
3.4



Perikanan
3.4



Kelistrikan
3.4



Telekomunikasi
3.5



Hotel/Resto
3.7



Air Minum
3.8



Farmasi
3.9

Paling Korup 0

100 Paling Bersih

Sangat Lazim 0

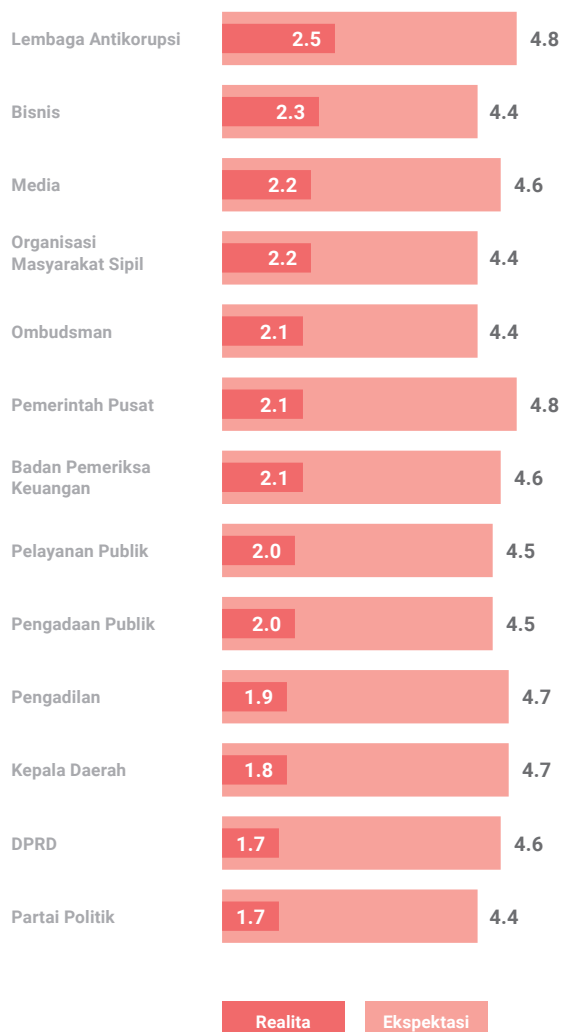
5 Tidak Lazim

6 Integritas Layanan Kota Medan

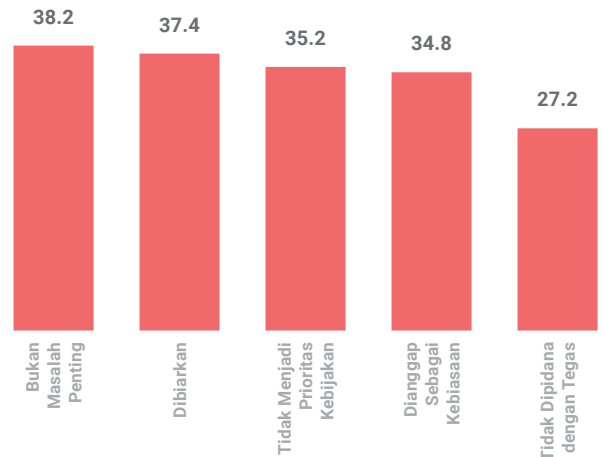
	Total Interaksi Layanan	Interaksi Suap	Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan & Energi	4	2	50%
Dinas Perdagangan	24	11	46%
Dinas Perindustrian	20	9	45%
Dinas Koperasi dan UKM	21	9	43%
Kepolisian	27	8	30%
Dinas Pendapatan Daerah	18	5	28%
Dinas Perhubungan	11	3	27%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26	7	27%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	12	3	25%
Badan Penanaman Modal dan Promosi	10	2	20%
Dinas Pekerjaan Umum	17	3	18%
Dinas Ketenagakerjaan	21	3	14%

Dalam interaksi layanan publik tingkat kota dengan bantuan **pihak ketiga**, pelaku usaha paling sering menggunakan **keluarga**, dengan alasan **tidak tahu prosedur**.

7 Pilar Sistem Integritas Lokal



8 Faktor penghambat pemberantasan korupsi



9 6 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor

10 2 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK

DEMOGRAFI DAN KETERANGAN SURVEI


Total responden: 100 pelaku usaha

Persebaran skala perusahaan

Besar 29% Menengah 33% Kecil 38%

Persebaran sektor industri

Manufaktur 49% Jasa 31% Keuangan 0%
Perdagangan 9% Konstruksi 11%

 021-2279 2806
021-2279 2807

 info@ti.or.id

 Transparency International
Indonesia

 @TIIndonesia

 ti.or.id

ISBN 978-602-72032-5-9

